

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan bertambahnya waktu, maka kota akan tumbuh dan berkembang mengikuti segala perkembangan yang ada. Adanya perkembangan tersebut menuntut suatu kota untuk melakukan pembangunan secara terus menerus demi kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan perkotaan menurut Todaro (2003:28) adalah suatu proses yang multidimensional yang tersusun dan terencana secara sistematis yang bertujuan untuk menciptakan suasana dan sistem baru. Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kota yang berkembang pesat pada saat sekarang ini. Terdapatnya faktor-faktor berupa lokasi yang strategis dan banyaknya industri dengan munculnya industri-industri besar seperti Ajinomoto dan Ngoro Industri menyebabkan semakin pesatnya Kabupaten Mojokerto ini.

Dengan kondisi tersebut maka semakin banyak penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, terutama disebabkan oleh tingginya arus urbanisasi penduduk. Besarnya arus urbanisasi tersebut disebabkan oleh adanya 2 faktor, yaitu daya tarik perkotaan sebagai penyedia lapangan kerja, fasilitas dan utilitas publik (*pull factor*) dan adanya tekanan kawasan perdesaan yang mempunyai keterbatasan lapangan kerja, fasilitas dan utilitas publik (*push factor*). Dengan adanya tingkat perpindahan penduduk yang cepat (laju urbanisasi yang tinggi), maka laju pertumbuhan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Mojokerto akan semakin pesat.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat akan menambah beban yang tidak ringan bagi suatu kota dalam penyiapan infrastruktur baru, seperti pendidikan, kesehatan, serta pelayanan-pelayanan perkotaan lainnya, apalagi para pendatang pada umumnya berpendidikan rendah, sehingga keadaan ini juga akan lebih menambah beban bagi pemerintah kota. Meningkatnya aktivitas perkotaan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kemudian diikuti dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk akan semakin terasa dampaknya terhadap

lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan secara terus menerus menyudutkan masyarakat pada permasalahan degradasi lingkungan.

Kondisi yang demikian dapat diprediksikan bahwa kedepan bahwa kota juga akan memproduksi sampah lebih banyak dan lebih bervariasi, oleh karenanya apabila tidak dilakukan penanganan yang baik sejak sekarang ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara, yang pada gilirannya kehidupan perkotaan dihadapkan kepada kehidupan yang tidak sehat lagi.

Di perkotaan masalah persampahan merupakan sebuah tantangan yang akan menentukan *sustainability* lingkungan suatu kota. Kegagalan menangani problem persampahan ini akan meningkatkan resiko warga kota berhadapan dengan berbagai macam penyakit yang akan meningkatkan biaya sosial untuk kesehatan. Selain itu dampak tidak langsung pengelolaan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh penyumbatan drainase dalam kota maupun terhambatnya arus air di sungai karena terhalang timbunan sampah yang dibuang ke sungai. Hal itu merupakan permasalahan serius bagi mereka yang hidup dan tinggal dalam kota tersebut.

Pengelolaan sampah, terutama di kawasan perkotaan, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi laju timbulan sampah yang tinggi, kepedulian masyarakat yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah yang selalu menimbulkan permasalahan tersendiri. Apabila perhatian dari pemerintah kurang terhadap kebersihan, maka dapat menimbulkan adanya pandangan tentang tata kehidupan yang kurang baik. Demikian juga dengan hal kebersihan, yang sangat erat hubungannya dengan keindahan, artinya keindahan lingkungan tidak akan pernah bisa dinikmati tanpa ditunjang dengan adanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Masalah sampah memang sudah seharusnya mendapat perhatian yang serius apabila tidak bisa kita lihat pada permasalahan yang dahulu pernah timbul. Bagi bom waktu, masalah sampah dapat “meledak” setiap saat tanpa dapat diduga

sebelumnya. Adakalanya sampah hanya dianggap sebagai barang buangan yang menjijikkan. Bahkan, pemulung dan tukang sampah pun masih dianggap rendah. Namun, saat “ledakan” bom sampah terjadi, semua pihak panik dan saling menyalahkan. Sebut saja kasus longsornya timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, Bekasi, di TPA Leuwigajah, Cimahi, dan di TPA Rancamaya, Bogor, yang menewaskan puluhan orang dan merusak permukiman penduduk di sekitarnya. Bahkan, di beberapa kota, kasus-kasus semacam itu ada yang diikuti aksi penutupan TPA oleh masyarakat sekitarnya. Masalah sampah ini terus saja terjadi setiap tahun, dari dulu sampai sekarang, tanpa ada penyelesaian yang pasti. Pemerintah pusat pun tidak segera turun tangan menanganinya. Akibatnya, penyelesaian sampah tidak tertangani sampai pada akar permasalahan.

Sistem pengelolaan sampah perkotaan yang sudah ada selama ini adalah pengumpulan/pewadahan, pemindahan/pengangkutan, pemusnahan/penggurugan melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya yang mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara - Tempat Penampungan Sementara (TPS-TPS) menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sistem ini dianggap belum optimal, karena kelemahan dalam manajemen operasional dan keterbatasan biaya operasional ditambah dengan langkanya tenaga profesional dalam penanganan sampah merupakan faktor utama permasalahan tersebut. Dalam pengelolaan sampah diperlukan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain tingkat pendidikan, pendapatan dan pengetahuan. Tanpa adanya peran serta masyarakat program persampahan tidak akan berhasil pengelolaannya (Barlian, 2000)

Terkait dengan ketentuan tersebut, dalam UU No. 18 tahun 2008 secara eksplisit juga dinyatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Dalam hal pengelolaan sampah pasal 12 dinyatakan, setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Masyarakat juga dinyatakan berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Tata cara partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat

dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan tatanan sosial budaya daerah masing-masing. Berangkat dari ketentuan tersebut, tentu menjadi kewajiban dan hak setiap orang baik secara individu maupun secara kolektif, demikian pula kelompok masyarakat pengusaha dan komponen masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang baik, bersih, dan sehat.

Masalah sampah di Kabupaten Mojokerto menjadi bagian penting yang menuntut perhatian secara khusus dari pemerintah setempat. Melihat pentingnya kebersihan dan pemeliharaan lingkungan hidup, maka diperlukan organisasi khusus yang menangani masalah tersebut secara baik yaitu sebuah organisasi yang diberikan wewenang sebagai pelaksana teknis oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, untuk menghadapi sampah sebagai tantangan pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menanggulangi masalah sampah agar terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang indah dan berseri. Operasional menyangkut tingkat pelayanan (100 persen daerah komersial dan pasar dan 50 persen daerah pemukiman yang secara bertahap akan ditingkatkan menjadi 100 persen) dan daerah pelayanan (pemukiman, komersial, fasilitas umum, penyapuan jalan, pembersihan saluran).

Dalam melakukan tugas dan fungsinya Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto masih terhambat dengan masalah-masalah dalam pengelolaan sampah seperti belum adanya dasar hukum yang kokoh seperti Perda pengelolaan sampah. Pembiayaan meliputi sumber dana dan biaya pengelolaan persampahan yang terdiri dari biaya operasi, pemeliharaan dan administrasi yang masih rendah. Pembiayaan merupakan aspek yang paling berpengaruh karena sebagian besar kegiatan dalam pengelolaan sampah memerlukan biaya, atau dapat dikatakan aspek pembiayaan merupakan ujung tombak dalam pengelolaan sampah. Karena akan sangat mempengaruhi aspek lainnya terutama aspek teknis operasional seperti dalam penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah seperti wadah sampah, sapu dan truk pengangkut sampah. Sumber dana yang digunakan untuk pengelolaan sampah masih terbatas, begitu juga sumberdana

yang diperoleh dari masyarakat, karena di Kabupaten Mojokerto masih belum ada penarikan retribusi khusus untuk pengelolaan sampah.

Aspek lain seperti teknik operasional, kelembagaan (instansi/organisasi) juga masih mengalami berbagai kendala. Apabila dikaji lebih cermat berdasarkan konsep kelembagaan, ternyata organisasi merupakan bagian (unit) pengambilan keputusan yang didalamnya diatur oleh sistem kelembagaan atau aturan main. Aturan main disini mencakup keserasian yang lebih luas dalam bentuk konstitusi suatu negara sampai pada kesepakatan diantara dua pihak (individu) yang menyepakati aturan bersama mengenai pembagian manfaat dan beban yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi. Hal tersebut mengingat bahwa Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto yang bertindak sebagai pihak pengawas, seharusnya mengukur kinerja keberhasilan pengelolaan sampah, sebagai dasar penyempurnaan rancang tindak penanganannya, dan bukan sebagai pelaksana penanganan persampahan.

Upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto juga harus terus dilakukan guna mengoptimalkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan serta mengurangi jumlah sampah yang ada. Banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah walaupun dinas yang terkait telah berusaha secara maksimal dalam mengelola kebersihan disebabkan kurangnya disiplin warga dalam mengelola sampah rumah tangga. Volume sampah itu sendiri akan semakin meningkat apabila warga kurang memperhatikan himbuan-himbauan agar hidup bersih dan menjaga lingkungan dari pemerintah. Selain itu permasalahan sarana prasarana khususnya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto merupakan aspek lain yang akan mempengaruhi kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dalam mengelola sampah.

Dari pernyataan diatas, maka setiap kegiatan pengelolaan sampah harus mengikuti filosofi pengelolaan sampah. Filosofi pengelolaan sampah adalah bahwa pengelolaan sampah yang baik harus memperhatikan unsur manajemen

persampahan dan peran serta aktif dari masyarakat sehingga terwujud adanya koordinasi yang baik antara dinas, swasta dan masyarakatnya Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **”PENGELOLAHAN SAMPAH SECARA TERPADU DI WILAYAH PERKOTAAN (Studi Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Mojokerto)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai dasar atau langkah awal bagi penelitian yang serupa di masa datang serta dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan yang lebih luas tentang manajemen pengolahan sampah secara terpadu di wilayah perkotaan

2. Secara Akademis

Sebagai bahan bacaan, referensi, kajian dan rujukan akademis pada umumnya dan untuk menambah wawasan pengetahuan atas partisipasi masyarakat yang baik dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerahnya bagi penulis pada khususnya.

3. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto dalam menciptakan kebersihan kotanya.

E. Kerangka Pemikiran

Sistematika pembahasan penelitian ini ditujukan agar sesuatu yang dihadapi dalam skripsi ini dapat dimengerti secara jelas dan tepat di dalam bab-bab yang saling berkaitan. Adapun uraian masing-masing bab tersebut akan memuat hal sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memberikan uraian tentang latar belakang masalah-masalah, perumusan masalah, tujuan, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan materi skripsi secara keseluruhan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memberikan uraian tinjauan atas kepustakaan yaitu berisi teori yang berhubungan dengan penelitian, baik yang mendukung maupun yang membandingkan, untuk kemudian dibuat kesimpulan dari teori yang telah dikaji.

BAB III : METODE PENELITIAN

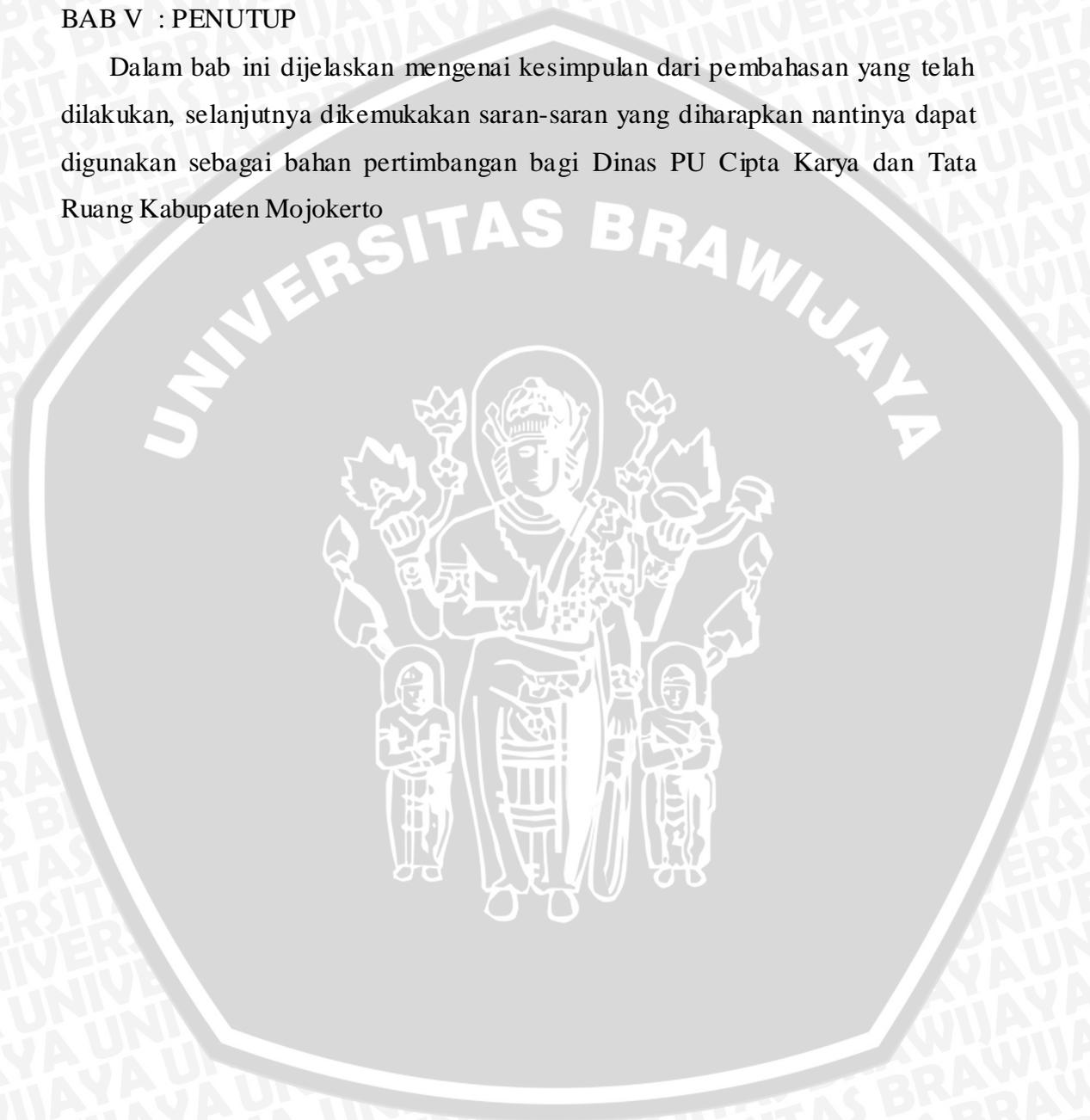
Merupakan pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membagi dalam dua sub bagian pokok, yaitu penyajian data di lapangan dan analisis hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, selanjutnya dikemukakan saran-saran yang diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Analisa terhadap suatu masalah akan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila ditunjang dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah itu sendiri. Teori sangat penting sebagai alat bantu dalam menentukan masalah yang akan diteliti, serta untuk dijadikan pedoman dalam mencari permasalahannya. Disamping itu teori juga akan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Lebih lanjut, seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1991:19) dalam bukunya metode penelitian masyarakat, mengatakan bahwa teori merupakan alat yang terpenting dari suatu ilmu pengetahuan. Tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak ada ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini, juga diperlukan teori-teori yang dipakai sebagai dasar untuk menunjang pembahasan. Teori dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menemukan permasalahan dan memudahkan dalam mencari jalan keluar permasalahan yang dijumpai.

A. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi

Administrasi dapat diklasifikasi administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit. Administrasi dalam arti luas adalah kegiatan manusia yang kooperatif terdiri dari 8 unsur yang oleh The Liang Gie di perinci sebagai berikut: (1) organisasi, (2) management, (3) komunikasi, (4) informasi, (5) personalia, (6) finansia, (7) materia, (8) humas atau relasi publik. Administrasi dalam arti sempit adalah tata usaha.

Pernyataan diatas berbeda dengan yang dikatakan oleh Malayu (2005:40), dikatakannya bahwasanya administrasi lebih dekat ke arah proses manajemen dimana didalamnya terdapat beberapa proses kegiatan yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, dan pengawasan, dapat dijelaskan lagi sebagai berikut:

a. *Planning* (Perencanaan)

Planning atau perencanaan adalah proses menentukan sasaran, alat, tuntutan-tuntutan, taksiran, pos-pos tujuan, pedoman, dan kesepakatan (*commitment*) yang menghasilkan program-program kegiatan yang terus berkembang. Perencanaan juga meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biayanya. Proses perencanaan dilaksanakan secara kolaboratif atau kerjasama, artinya dengan mengikut sertakan personel pegawai dinas yang bersangkutan dalam semua tahap perencanaan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing atau pengorganisasian adalah tingkat kemampuan pimpinan sebagai pengambil kebijakan pada birokrasi pemerintah dan kepala dinas yang bersangkutan sebagai pimpinan kegiatan. Pengorganisasian juga diartikan sebagai kegiatan membagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan nanti.

Salah satu prinsip organisasi adalah terbaginya semua tugas dalam berbagai unsur organisasi secara proporsional, dengan kata lain pengorganisasian yang efektif adalah membagi habis dan menstrukturkan tugas-tugas kedalam sub-sub atau komponen-komponen organisasi.

c. *Actuating* (Penggerakan/Pelaksanaan)

Actuating atau penggerakan berarti merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah upaya untuk mengendalikan, membina dan pelurusan sebagai upaya pengendalian mutu dalam arti luas. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk mengetahui realisasi perilaku personel dalam organisasi dan apakah tingkat pencapaian tujuan kegiatan sesuai dengan yang dikehendaki, kemudian dari hasil pengawasan tersebut apakah dilakukan perbaikan.

Dari pengertian dimensi administrasi diatas kemudian ilmu administrasi mengalami perubahan paradigma manajemen dalam perkembangannya mengikuti fenomena yang terjadi di masyarakat.

Perubahan paradigma manajemen pemerintahan telah mendorong perkembangan administrasi publik yang sangat dinamis mengikuti dinamika lingkungannya. Sebagai dampak dari perubahan global, administrasi publik akan mengalami perubahan mendasar terutama peran dan orientasi yang ingin dicapai. Dalam era global kita melihat berkembang dan tumbuhnya sistem administrasi publik dan pemerintahan yang semakin efisien, efektif. Pergeseran peran telah mulai terjadi dimana fungsi pemerintah dalam berbagai segi kehidupan ekonomi, sosial telah bergeser dari peran pemerintah yang begitu besar ke arah mendorong lembaga-lembaga masyarakat/swasta untuk mengambil bagian yang besar dalam menjalankan sebagai fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat (Kartasmita, 1996:67). Pemerintah cukup hanya berfungsi sebagai pengarah tidak lagi berfungsi sebagai pengatur yang dominan. Hal ini berimplikasi pada adanya keinginan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.

Perubahan peran administrasi publik akan selalu seiring dengan dinamika masyarakat dimana sistem administrasi negara itu berada. Efektifitas, rasionalitas dan produktivitas merupakan hal yang penting dalam sebuah birokrasi, tetapi yang lebih penting adalah administrasi negara harus menciptakan keadilan sosial, berdasarkan kebutuhan pada semua lapisan masyarakat. Hal ini berarti administrasi negara berusaha untuk merubah kebijakan-kebijakan maupun struktur-struktur yang secara sistematis merintanginya terciptanya keadilan sosial.

Administrasi publik memiliki fungsi untuk menjalankan kebijaksanaan dan program-program kegiatan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka hirarki kebijaksanaan. Sehubungan dengan hal ini perkembangan administrasi publik akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perkembangan tuntutan dan aspirasi dan pelayanan kebutuhan masyarakat yang cenderung selalu dinamis.

Seorang pakar administrasi Nicholas Henry telah mengidentifikasi alur perkembangan administrasi publik sebagai kajian akademik ke dalam lima paradigma. Paradigma pertama adalah dikhotomi politik administrasi publik. Paradigma kedua adalah prinsip-prinsip administrasi yang berkembang antara tahun 1927-1937. Paradigma ketiga disebut paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik. Paradigma keempat, yang berkembang antara tahun 1956 hingga 1970 memandang administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Dalam konteks ini terdapat perkembangan untuk menempatkan lokus disiplin administrasi publik secara proporsial pada akar keilmuan administrasi dan manajemen yang berkembang sejak Henry Fayol menulis bukunya yang berjudul *Industrial and General Administration* (1949). Paradigma kelima yang berkembang sejak tahun 1970, menempatkan administrasi publik sebagai disiplin akademik administrasi publik. Dalam hal ini bahwa administrasi publik telah berkembang sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Administrasi publik yang berkembang setelah paradigma kelima yang diidentifikasi oleh Henry adalah paradigma administrasi pembangunan. Hal ini didasarkan pada temuan-temuan hasil kajian kelompok studi komparatif administrasi (CAG) yang menyebutkan bahwa "administrasi publik lebih berorientasi untuk mendukung usaha-usaha pembangunan negara-negara yang belum maju". Pada umumnya proses kegiatan ini disebut sebagai administrasi pembangunan. Sedangkan di negara-negara maju dewasa ini, administrasi publik lebih diarahkan kepada upaya pencarian bentuk kelembagaan yang tepat, ketatalaksanaan dan aspek kualitas sumber daya manusia aparatur yang pada intinya adalah reformasi administrasi. Paradigma berikutnya adalah mewirauahakan birokrasi dan perkembangan yang terakhir adalah penyelenggaraan pemerintahan/administrasi publik yang baik (*good governance*) yang bercirikan kepastian hukum, keterbukaan, akuntability dan konsistensi.

Sementara beberapa teoritik administrasi berpendapat bahwa peranan administrasi publik harus makin terfokuskan pada upaya menghasilkan barang dan efisiensi dalam pelayanan publik melalui pengadaan barang-barang publik (*public*

goods) dan pelayanan jasa publik dimana sama pentingnya dengan mekanisme pasar yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bercirikan *good governance*. Untuk mewujudkan hal tersebut, administrasi publik perlu didukung oleh birokrasi yang memiliki semangat wirausaha.

Perubahan orientasi dan peran administrasi publik diperlukan untuk merespon dinamika masyarakat yang tinggi terutama dalam menciptakan pelayanan yang efisien dan efektif serta menciptakan keadilan sosial bagi warga masyarakat. Hal ini diperlukan karena administrasi publik berfungsi sebagai instrumen publik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian fungsi aparatur sebagai pelayanan masyarakat harus dominan dan diutamakan ketimbang fungsi sebagai abdi negara. Kartasmita (1996:142) melakukan analisis reposisi terhadap paradigma administrasi pembangunan (birokrasi) yang selama 32 tahun memiliki peran yang besar dalam pembangunan bangsa, yaitu: perubahan dalam polarisasi: (1) orientasi birokrasi bergeser dari yang kuat kepada yang lemah dan kurang berdaya, (2) birokrasi harus membangun partisipasi rakyat, (3) peranan birokrasi bergeser dari mengendalikan ke mengarahkan, dan (4) birokrasi harus mengembangkan keterbukaan dan kebertanggungjawaban. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan harus didasarkan pada prinsip-prinsip: pemberdayaan, pelayanan, partisipasi, kemitraan, dan desentralisasi.

Fungsi pemberdayaan, aparatur pemerintah tidak harus berupaya melakukan sendiri, tetapi mengarahkan. Sesuatu yang sudah bisa dilakukan oleh masyarakat, jangan dilakukan oleh pemerintah. Apabila masyarakat atau sebagian dari mereka belum mampu atau tidak berdaya, maka harus diberdayakan (*empowering*). Pemberdayaan berarti pula memberi peran kepada masyarakat lapisan bawah di dalam keikutsertaannya dalam proses pembangunan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, peran pemerintah dapat ditingkatkan antara lain melalui

- a. Pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat,

- b. Perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan
- c. Pengembangan proses untuk lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat belajar dan berperan aktif (*social learning process*) dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Upaya pemberdayaan memerlukan semangat untuk melayani (*a spirit of public services*), dan menjadi mitra masyarakat (*partner of society*): yaitu melakukan kerjasama dengan masyarakat. Hal ini memerlukan perubahan perilaku yang antara lain dapat dilakukan melalui pembudayaan kode etik (*code of ethical conducts*) yang didasarkan pada dukungan lingkungan (*enabling strategy*) yang diterjemahkan dalam standar tingkah laku yang dapat diterima umum dan dijadikan acuan perilaku aparatur pemerintah.

Pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan dalam membangun yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku melayani, bukan dilayani, mendorong bukan menghambat, mempermudah bukan mempersulit, sederhana bukan berbelit-belit, terbuka untuk setiap orang bukan hanya untuk segelintir orang. Dengan demikian makna administrasi publik sebagai wahana penyelenggaraan pemerintahan negara yang harus melayani publik harus benar-benar dihayati para penyelenggara pemerintahan negara.

Partisipasi masyarakat harus diikutsertakan dalam proses menghasilkan pelayanan yang baik dengan mengembangkan pola kemitraan dan kebersamaan dan bukan semata-mata dilayani. Untuk itulah kemampuan masyarakat harus diperkuat, kepercayaan masyarakat harus meningkat dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi harus ditingkatkan.

Upaya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, peningkatan partisipasi dan kemitraan sangat memerlukan keterbukaan birokrasi pemerintah, juga disamping itu memerlukan langkah-langkah yang tegas dalam mengurangi peraturan dan prosedur yang menghambat kreativitas dan aktivitas mereka dan

memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam proses penyusunan peraturan kebijaksanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan.

Inti dari perubahan peran dan orientasi administrasi publik adalah bahwa bentuk organisasi birokrasi yang ada sekarang harus berubah sesuai dengan tuntutan perubahan itu sendiri, yaitu bentuk organisasi yang terbuka, fleksibel, ramping atau pipih (*flat*), efisiensi dan rasional, terdesentralisasi, kaya fungsi miskin struktur sehingga memungkinkan organisasi birokrasi lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Aspek sistem meliputi pemahaman terhadap visi dan misi organisasi berdasarkan tuntutan perubahan lingkungan, nilai dan budaya yang dimiliki organisasi yang menjadi ciri khas organisasi dan sekaligus menjadi perekat dan motivasi anggota organisasi untuk mengembangkan berbagai aktivitas keorganisasian baik dalam melakukan hubungan secara internal maupun dalam melakukan hubungan eksternal. Sedangkan aspek strategi mencakup kemampuan organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, pemahaman kemampuan memanfaatkan peluang, tantangan, ancaman dan kelemahan serta kekuatan yang dimiliki organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dan pada akhirnya dapat berhasil dan meraih kemampuan kompetitif. Administrasi publik (Birokrasi) ke depan harus menata kembali visi, misi tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya dalam rangka memberikan pelayanan publik yang cepat, efisien, terbuka, dan akuntabel.

Administrasi publik dalam implementasinya sangat berperan penting untuk mendorong kemajuan sebuah pembangunan baik pada organisasi maupun pembangunan nasional.

2. Pengertian Pembangunan

Dalam kamus umum bahasa Indonesia (1998:88), pengertian pembangunan adalah pembinaan, hal (cara, perbuatan) membangunkan. Menurut Siagian seperti yang dikutip oleh Suryono (2004:21) pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Hal senada disampaikan oleh Suryono (2004:62) menyimpulkan beberapa makna pembangunan yaitu :

- a. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- b. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
- c. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).
- d. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep transendentan, sebagai *metadisciplinary phenomenon*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideology of developmentalism*.
- e. Pembangunan sebagai bangsa yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat.
- f. Pembangunan menjadi *culture specific, situation specific* dan *time specific*.

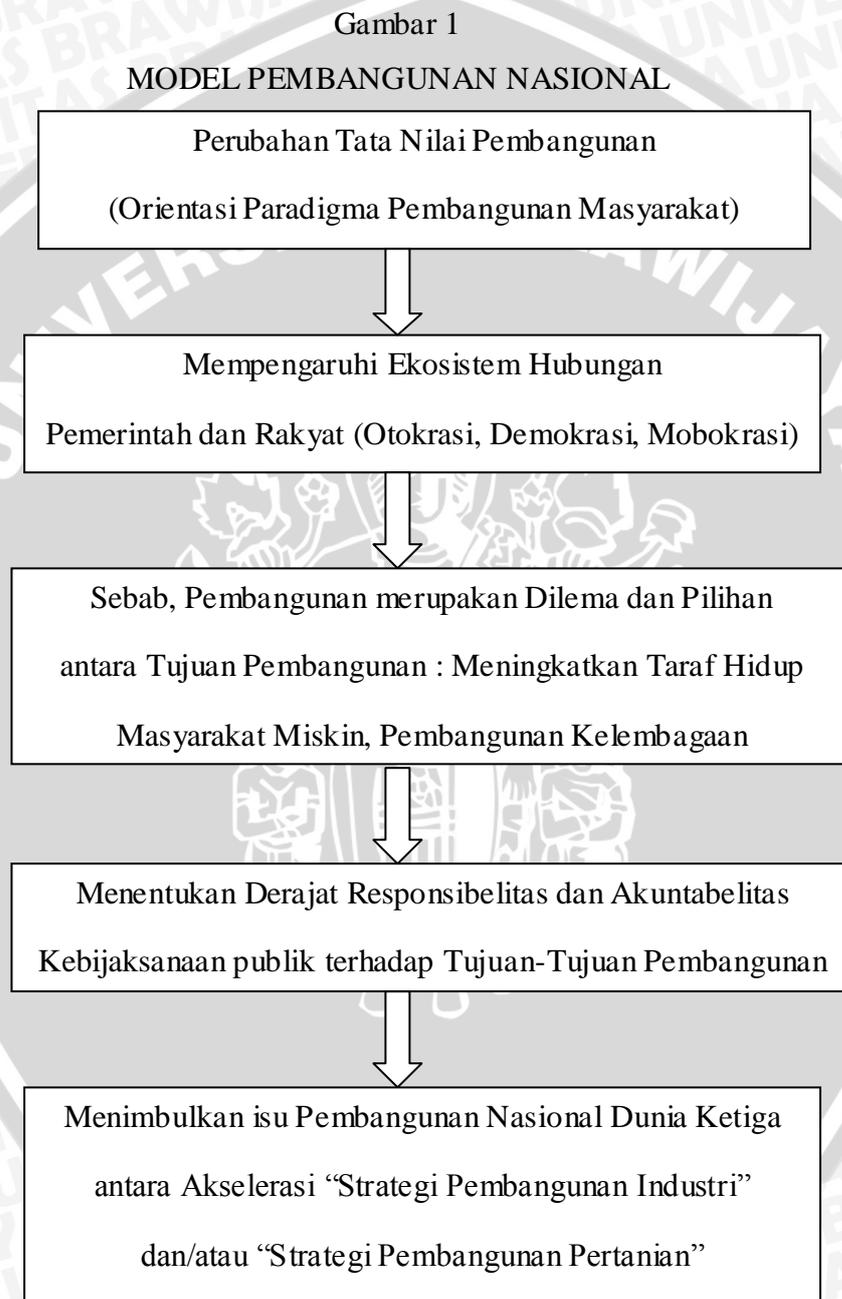
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan berarti upaya yang terus-menerus dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan peranannya secara wajar yakni sebagai subyek dan obyek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya.

1. Tipe dan Model Pembangunan

Menurut Suryono (2004:22) menyebutkan adanya 8 (delapan) tipe pembangunan, yakni:

1. tipe ideal (*ideal type*) dengan ciri perencanaan yang mampu mengendalikan pertumbuhan dan perubahan sistem;
2. tipe menghasilkan dalam jangka pendek (*short run pay of*) dengan ciri perencanaan yang mampu mengendalikan pertumbuhan, tetapi tidak dalam perubahan sistem;
3. tipe menghasilkan dalam jangka panjang (*long run pay of*) dengan ciri perencanaan yang mampu mengendalikan perubahan sistem, tetapi tidak dalam pertumbuhan;
4. tipe kegagalan (*failure*) dengan ciri adanya perencanaan tetapi tidak mampu mengendalikan baik pertumbuhan maupun perubahan sistem;
5. tipe dorongan lingkungan (*environmental stimulus*) dengan ciri mengutamakan perubahan sistem dan mengabaikan pentingnya perencanaan dan pertumbuhan;
6. tipe pragmatis (*pragmatisme*) dengan ciri mengutamakan adanya pertumbuhan dan perubahan sistem, tetapi mengabaikan pentingnya perencanaan;
7. tipe krisis (*crisis*), dengan ciri lebih mengutamakan tingkat pertumbuhan dan mengabaikan pentingnya perencanaan dan perubahan sistem; dan
8. tipe masyarakat (*static society*), dengan ciri mengabaikan pentingnya semua aspek perencanaan, pertumbuhan, maupun perubahan sistem.

Sedangkan secara skematis apa yang disampaikan oleh Suryono (2004:25) mengenai rangkaian model pembangunan nasional, dapat disederhanakan dalam bagan model pembangunan nasional seperti terlihat pada gambar 1 sebagai berikut:



Sumber: Suryono (2004:25)

Selain itu model pembangunan menurut Suryono (2004:25) bahwasannya yang dibutuhkan di dalam sebuah pembangunan tidak lain menekankan pada

suatu rangkaian model nasional yang dibuat oleh bangsa yang bersangkutan tersebut yaitu:

- (1) didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh mengenai kebutuhan nasional;
- (2) bergerak pada kecepatan berapa saja yang layak; dan
- (3) diarahkan menuju apa yang dipersepsikan oleh negara dan masyarakat tersebut sebagai tujuannya.

3. Pengertian Administrasi Pembangunan

Penyelenggara ilmu administrasi pada dasarnya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu setiap kegiatan dalam administrasi diupayakan untuk tercapainya tujuan sesuai dengan yang direncanakan dan mengandung rasio yang terbaik antara masukan dan keluaran.

Ilmu administrasi negara berkembang tidak lepas dari perkembangan ilmu-ilmu lainnya yang mengkaji proses pembangunan terutama dalam administrasi pembangunan. Ilmu-ilmu sosial lainnya cenderung memusatkan perhatian kepada studi pembangunan, memperkuat dan menambah perkembangan dari pembangunan itu sendiri baik sebagai ilmupun sebagai seni.

Menurut Islamy (2004:42), administrasi pembangunan pada hakekatnya adalah administrasi negara yang mendukung usaha-usaha pembangunan. Administrasi publik berperan sentral dalam memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, karena administrasi publik pada intinya melaksanakan pembangunan dan mengurus atau memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian administrasi pembangunan merupakan penyempurna birokrasi (aparatur pemerintah) untuk menghadapi meningkatnya jumlah, jenis dan kompleksitas fungsi-fungsi pemerintah guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.

Sedangkan menurut Siagian (1988:22), administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa, dalam berbagai suatu aspek kehidupan bangsa, dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan daftar-daftar tersebut diatas, administrasi pembangunan menunjukkan adanya kecenderungan menempatkan administrasi pembangunan dalam dua lingkup permasalahan pokok yaitu pembangunan administrasi negara, dan administrasi penyelenggara pembangunan/manajemen pembangunan.

Manajemen pembangunan yang baik sangat diperlukan oleh Pemerintah dalam implementasinya karena seperti kita ketahui bahwasannya pembangunan membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pembangunan yaitu adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan maju sedangkan dampak negatif dari adanya pembangunan ini juga tidak sedikit yaitu salah satunya permasalahan sampah.

B. Sampah dan Permasalahannya

1. Arti Sampah, Sumber dan Klasifikasi Berdasarkan Cara Pengelolaan

Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari hampir segala aktivitas yang kita lakukan menghasilkan sampah. Namun pada dasarnya kita hanya menganggap segala sesuatu yang sudah tidak terpakai lagi atau tidak berguna merupakan sampah dan harus dibuang. Oleh karena itu, perlu adanya suatu uraian tentang arti dari sampah itu sendiri. Ciri-ciri dari sampah menurut Hardiwiyo, Soewodo (1983:12) adalah sebagai berikut :

1. Sampah adalah bahan sisa, baik bahan yang sudah tidak digunakan lagi (barang bekas) maupun bahan yang sudah diambil bagian utamanya
2. Dari sosial ekonomis, sampah adalah bahan yang sudah tidak ada harganya
3. Dari segi lingkungan, sampah adalah bahan buangan yang tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan pada kelestarian lingkungan

Dari ciri-ciri tersebut dapat diberikan batasan secara definitif sebagai berikut: sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran dan gangguan kelestarian.

Sedangkan menurut teoritis yang lain ada yang mengatakan bahwa sampah yaitu bahan yang tidak dapat dipakai lagi (refuse), karena telah diambil bagian

utamanya dengan pengolahan, menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomis tidak ada harganya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampah yaitu semua sisa benda, baik cair, gas dan benda padat yang sudah tidak berguna lagi. Setelah diuraikan mengenai arti sampah, kemudian akan dijelaskan tentang sumber-sumber sampah. Menurut E. Gumbira (1987:9-11), sumber-sumber dari sampah tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Sampah rumah tangga

Yaitu sampah yang ditimbulkan dari aktivitas rumah tangga yang biasanya berupa sisa makanan, sayur-sayuran, sisa buah-buahan, kertas dan plastic pembungkus serta kaleng bekas, dll.

b. Sampah perdagangan

Yaitu sampah yang berasal dari pusat-pusat perdagangan, seperti pasar, pertokoan, supermarket, warga dan tempat-tempat jual beli lainnya.

c. Sampah industri

Yaitu sampah yang berasal dari kegiatan-kegiatan industry, yang jumlah dan jenisnya sangat tergantung pada jenis dan jumlah bahan yang diolah oleh pabrik industry tersebut. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa limbah, barang pembungkus, sisa makanan, dll.

d. Sampah jalan

Yaitu sampah yang berserakan di jalan yang ditimbulkan oleh para pemakai jalan dan pohon-pohon ditepi jalan.

e. Sampah dari tempat-tempat umum

Yaitu sampah yang berasal dari tempat-tempat umum, seperti terminal, pelabuhan, tempat rekreasi, dll.

f. Sampah daerah terbuka

Yaitu sampah-sampah yang berasal dari daerah terbuka baik dari pertanian, perkebunan, daerah peternakan, yang biasanya berupa daun-daunan yang tidak diperlukan lagi.

g. Sampah dari hasil kegiatan pembangunan

Sampah ini berupa sisa-sisa bahan bangunan yang tidak dipakai lagi, yang biasanya berupa potongan kayu, triplek, seng, kaca, besi, dll.

Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke (1) tempat pembuangan sampah sementara, atau ke (2) pengolahan sampah skala kawasan, atau (3) langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan. Sedangkan cara pengambilan sampah dari wadah umumnya dilakukan secara :

- a. Langsung: kendaraan pengangkut mengambil sampah dan langsung dibawa ke tempat pengolahan.

- b. Tidak langsung: sampah diangkut dari wadahnya dengan menggunakan gerobak pengangkutan sampah atau sejenisnya untuk terlebih dahulu dikumpulkan dan kemudian diambil oleh kendaraan pengangkut.

2. Permasalahan Sampah

Sampah jelas menjadi suatu permasalahan bagi masyarakat dan pemerintah sebagai aparatur Negara, baik dari segi pengelolaannya, penyelenggaraannya, penyediaan dana, sarana dan prasarana serta tenaganya. Disamping itu permasalahan dengan kondisi sampah itu sendiri, sebagaimana yang diungkapkan oleh E. Gumbira (1987:15-17) berikut ini:

- a. Sampah menimbulkan perasaan tidak estetik, menjijikkan, perasaan kotor dan memuakkan pemandangan mata. Lebih jauh lagi bila keadaan ini terlihat didaerah elit perkotaan oleh para pendatang akan menurunkan citra masyarakatnya.
- b. Sampah baik bersifat organik maupun unorganik akan menjadi sarang penyakit yang dampaknya akan sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungannya.
- c. Sampah organik akan membusuk dan menimbulkan bau yang akan mencemari udara, terutama cemaran bau dan kotoran debu berpenyakit. Lebih-lebih bila hal ini terjadi pada daerah kumuh.
- d. Sampah yang terkena air dan membusuk juga akan mencemari air disekelilingnya baik dengan warna, bau, penyakit, mikroorganisme patogen.
- e. Sampah kering akan menjadi berterbangan bila diterpa angin dan ini amat potensial untuk menimbulkan bahaya kebakaran terutama di daerah yang padat penduduknya
- f. Sampah yang dibuang sembarangan cenderung masuk ke selokan-selokan dan menyumbatnya. Hal ini berbahaya jika pada musim penghujan akan dapat menyebabkan banjir.
- g. Sampah bersifat stasioner, tidak sefleksibel limbah cair atau gas dalam pergerakannya sehingga jika telah menumpuk pada suatu tempat hal itu akan tetap berada ditempat tersebut.
- h. Keragaman sampah yang tinggi dan tercampur baur sangat menyulitkan penanganannya sehingga diperlukan biaya yang relatif mahal.
- i. Keadaan masyarakat yang cukup rendah pendidikannya menyebabkan perilaku dalam menangani sampah masih sembarangan.
- j. Fasilitas, sarana dan biaya operasional penanggulangan sampah masih belum memadai dan tidak seimbang dengan bertambahnya sampah setiap hari.

Dari uraian yang dikemukakan oleh E. Gumbira Sa'id, Nampak jelas pengaruh sampah terhadap lingkungan hidup. Pengelolaan sampah yang tidak baik akan mengganggu kebersihan, kesehatan dan keseimbangan lingkungan, sehingga sampah selalu menjadi inti dalam masalah kebersihan lingkungan, terutama didaerah-daerah perkotaan.

Karena kebersihan dan kesehatan lingkungan banyak dipengaruhi oleh jumlah dan jenis sampah yang ada, sedangkan kebersihan dan kesehatan lingkungan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia, maka perlu adanya perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

C. Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah baik berupa pengumpulan, distribusi pembuangan maupun pembuangan sampah pada dasarnya merupakan aktifitas dari masyarakat bersama aparat pemerintah yang saling mengadakan kerjasama dalam mencapai tujuan berupa keadaan lingkungan kota yang bersih, sehat dan terhindar dari berbagai pencemaran. Proses pengelolaan yang seperti demikian ini sebenarnya sudah termasuk dalam kegiatan manajemen. Syamsi (1994:58) menyatakan bahwa manajemen adalah proses untuk mengarahkan suatu kegiatan agar mencapai tujuannya. Adapun prinsip-prinsip manajemen menurut Syamsi (1994:60) sebagai berikut:

1. Pembagian kerja secara tuntas
2. Adanya wewenang
3. Disiplin
4. Kesatuan perintah
5. Kesatuan pengarahan
6. Kepentingan organisasi
7. Pemberian rangsangan kerja
8. Sentralisasi sebagian dari kekuasaan
9. Garis wewenang jelas batasnya
10. Tatanan yang baik
11. Stabilitas anggotanya

Selanjutnya, Hasibuan (2005:259) menambahkan bahwa manajemen dipandang sebagai suatu kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, maka manajemen pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan manajemen pengelolaan sampah secara terpadu.

Selain itu proses dari manajemen ini erat kaitannya dengan administrasi yaitu sama-sama memiliki fungsi untuk mengarahkan. Ditambahkan oleh Gie, The Liang (1987:14) dengan membagi unsur-unsur administrasi menjadi 8 macam yang merupakan sub konsep dari pengertian ilmu administrasi, yaitu:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Informasi
5. Personalia
6. Finansial
7. Material
8. Relasi Publik

Organisasi sebagai suatu unsur pertama, menunjuk pada penataan serta pembagian kerja dari usaha kerjasama. Unsur kedua adalah manajemen yang pengertian singkatnya adalah sebagai aktifitas menggerakkan segenap orang dan mengerahkan semua fasilitas yang dipunyai kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian untuk peningkatan pengelolaan sampah oleh dinas kebersihan tidak terlepas dari kegiatan menggerakkan setiap petugas operasional beserta masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih.

Unsur ketiga adalah komunikasi, yang merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyampaian warta dari seseorang kepada pihak lain yang tercakup dalam kerjasama tertentu. Unsur ini sangat berperan dalam masyarakat karena dapat meningkatkan kemauan berpartisipasi. Hal ini sangat dimungkinkan karena banyaknya media massa yang tersedia. Informasi sebagai unsur keempat, adalah kegiatan mengurus ketatausahaan yang diperlukan dalam mendukung tugas pelaksanaan pada kantor dinas kebersihan.

Unsur kelima adalah personalia yang merupakan aktivitas dalam penerimaan, pengangkatan dan penempatan jenjang kepangkatan, pengembangan kesejahteraan dan pemberhentian tenaga kerja dalam usaha kerjasama. Finansial merupakan unsur keenam yang berupa kegiatan penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber biaya, cara pemakaian pembukuan dan pertanggungjawaban atas pembiayaan.

Unsur ketujuh yaitu material yang merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan, pencatatan, pengaturan, pemakaian dan pemeliharaan alat-alat. Sedangkan unsur yang terakhir yaitu unsur kedelapan adalah relasi publik yaitu kegiatan pengenalan aktivitas organisasi kepada lingkungan disekitarnya dan berusaha menangkap hasrat serta suasana lingkungan. Tujuan organisasi akan dapat dicapai secara efektif apabila unsur-unsur administrasi tersebut dilaksanakan secara baik dan tepat. Apabila administrasi pengelolaan sampah ini atau manajemen sampah ini telah dilakukan dengan baik, maka dengan sendirinya mempermudah dalam melakukan pengumpulan dan pembuangan sampah.

2. Proses Pengumpulan dan Pembuangan Sampah

Salah satu dari aspek pengelolaan sampah adalah bagaimana sampah tersebut dikumpulkan yang kemudian dibuang pada pembuangan. Proses pengumpulan sampah adalah pengumpulan yang dilakukan pada tiap-tiap rumah maupun ditempat-tempat pertokoan melalui bak sampah yang telah disediakan.

Sedangkan proses pembuangan sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara, beberapa faktor yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah:

a. Segi praktis

1. Memudahkan cara pelaksanaan.
2. Dilakukan dengan cepat dan dapat tertampung dengan menggunakan sarana yang sederhana.

b. Segi keindahan

1. Mengurangi dan menghilangkan bau busuk yang mengganggu.
2. Mengurangi dan menghilangkan pandangan yang tidak sedap.

c. Segi kesehatan lingkungan

1. Tidak menimbulkan kerusakan lingkungan ataupun pencemaran terhadap air sungai sebagai bahan dasar air minum yang bersih diperkotaan
2. Mengusahakan agar tempat pembuangan sampah tidak menjadi sarang tikus dan berbagai serangga pembawa penyakit lainnya.

Kegiatan yang mendahului kegiatan pembuangan sampah ini adalah pengumpulan sampah ditempat, penampungan sementara dan pengangkutan menuju lokasi pembuangan akhir. Pengadaan tempat sampah di wilayah perumahan ada kalanya merupakan bantuan dari pemerintah kota, tetapi adalah bijaksana jika masyarakat sendiri yang berusaha memperoleh pengadaannya karena hal ini menunjuk pada partisipasi aktif masyarakat.

Sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah, maka sampah dari pengumpulan ditempat, dikumpulkan pada depottransfer yang letaknya harus benar-benar strategis serta diupayakan tetap menjaga keadaan lingkungan yang bersih. Semua ini dikarenakan lokasi pembuangan sampah sementara atau depottransfer masih dekat dengan pemukiman penduduk sehingga diharapkan dapat ditekan sekecil mungkin akibat yang bisa ditimbulkan terhadap kesehatan lingkungan.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah merupakan proses akhir dari sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan. Menurut metode pembuangannya, TPA dibagi menjadi 3 tipe (Anonimous, 2001:49), yaitu:

1. Open dumping, yang merupakan metode pembuangan sampah yang sangat sederhana, yaitu dengan cara penimbunan tanpa pengendalian lingkungan.
2. Controlled landfill, yang merupakan cara pembuangan sampah dengan sedikit pengendalian lingkungan, yaitu dengan menutup timbunan sampah beberapa hari atau 1 minggu sekali dengan tanah. Dalam system ini tidak ada sedikitpun pengendalian air lindi maupun gas yang terbentuk.
3. Sanitary landfill, yang merupakan metode pembuangan sampah secara terkendali, dimana penutupan tanah dilakukan per sel harian pada setiap akhir operasi harian, seluruh cairan lindi dan gas yang keluar dari timbunan sampah dikelola secara baik dan sehat.

Sedangkan lokasi pembuangan akhir sampah yang baik harus mempunyai persyaratan (Anonimous, 2001:2) :

- a. Lokasi dan kondisi TPA harus cukup aman terhadap daerah pemukiman serta sarana dan prasarana penunjangnya (sekolah, pasar, dll) yaitu untuk mencegah terjadinya gangguan berupa:
 1. kebisingan dan debu akibat lalu lintas kendaraan pengangkut sampah dan mesin-mesin alat berat yang beroperasi di lokasi TPA.
 2. kemungkinan adanya serangga (lalat) dan bau.
 3. pencemaran udara oleh gas yang timbul akibat proses penguraian.
 4. pencemaran air permukaan dan air tanah oleh leachate (cairan sampah).
- b. Lokasi TPA harus memenuhi kondisi topographi dan hidrogeologi
 1. secara topographi, lokasi TPA hendaknya tidak terletak di bagian atas/hulu dari sumber air yang dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih.
 2. lokasi TPA harus terletak pada daerah yang bebas banjir untuk menghindari hanyutan sampah dan leachate ke tempat lain.
 3. lapisan tanah dasar TPA sebaiknya berupa lapisan yang relative kedap air seperti tanah lempung (clay) untuk mencegah terjadinya rembesan leachate ke dalam air tanah
- c. Lokasi TPA harus memperlihatkan factor efisiensi pengangkutan. Lokasi TPA sebaiknya tidak terlalu jauh dari sumber sampah atau daerah pelayanan (kurang dari 20 km) agar biaya transportasi sampah tidak terlalu besar.
- d. Periode operasi pemakaian TPA harus cukup ekonomis. TPA sebaiknya dapat dioperasikan selama periode waktu yang cukup panjang, minimal 5 (lima) tahun.

Selain itu untuk dapat menjamin kelancaran operasional pembuangan sampah, menurut petunjuk teknis bidang persampahan sebaiknya TPA dilengkapi sarana dan prasarana yang meliputi (Anonimous, 2001 : 50-51):

1. Fasilitas umum (jalan masuk, kantor/pos jaga, saluran drainase dan pagar)
2. Fasilitas perlindungan lingkungan (lapisan dasar kedap air, pengumpul lindi, pengolahan lindi, ventilasi gas, daerah penyangga dan tanah tutup)
3. Fasilitas operasional (alat besar dan truk pengangkut tanah)

Program pengurangan sampah di sumbernya adalah merupakan tanggung jawab masyarakat bersama. Program ini dapat dilaksanakan secara terpadu oleh institusi lain yang terkait, selain Dinas Kebersihan, seperti Depdiknas, Departemen Kesehatan, LSM dan lembaga lainnya. Selain itu perlu juga untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan pengelolaan sampah.

3. Faktor-Faktor Dalam Pengelolaan Sampah

Penanganan masalah persampahan memerlukan berbagai macam pendekatan, baik teknis maupun non teknis, yang meliputi beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

a. Aspek Institusi

Dalam sistem pengelolaan persampahan, aspek institusi memegang peranan yang besar karena menyangkut masalah manajemen yang meliputi kejelasan tentang status unit pengelola persampahan, struktur organisasi yang sesuai, personalia yang mampu menangani masalah-masalah persampahan dan lain-lain.

b. Aspek Legal

Sistem pengelolaan persampahan sangat ditentukan oleh peraturan-peraturan yang mendukungnya.

c. Aspek Pembiayaan

Suatu sistem pengelolaan persampahan membutuhkan sejumlah dana untuk membiayai operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi serta perluasan daerah pelayanan sesuai dengan perencanaan.

d. Aspek Teknis

Aspek teknis/operasional dalam system pengelolaan persampahan meliputi penghitungan produksi sampah, penentuan daerah pelayanan, penentuan cara pengumpulan dan pengangkutan sampah serta cara pembuangan akhir, termasuk di dalamnya penentuan peralatan yang dibutuhkan.

e. Aspek Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat di dalam pengelolaan persampahan sangat diperlukan, terutama dalam hal :

1. Masyarakat turut memelihara kebersihan lingkungannya.
2. Masyarakat secara berkesinambungan membayar retribusi.
3. Masyarakat dalam suatu organisasi masyarakat (RT/RW, LKMD dan lain-lain) turut aktif dalam pelaksanaan subsistem pengumpulan sampah dan lain-lain.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah menurut penelitian Nitikesari (2005) di antaranya:

A. Faktor Internal

1. Faktor kekuatan organisasi

- a. Tersedianya aparatur pemerintah yang mempunyai sumber daya manusia berkualitas,
- b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang tugas operasional,
- c. Terciptanya mekanisme kerja dengan menempatkan tenaga sesuai dengan keahlian masing-masing
- d. Dukungan dana dari APBD dan retribusi.

2. Faktor kelemahan organisasi

- a. Terbatasnya tenaga operasional teknis,
- b. Terbatasnya sarana prasana operasional
- c. Terbatasnya anggaran operasional

B. Faktor Eksternal

1. Faktor peluang organisasi

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan keindahan.

2. Faktor tantangan organisasi

- a. luasnya wilayah pelayanan
- b. kurangnya kualitas sumber daya manusia pelaksana di lapangan.

Pengelolaan sampah perkotaan juga memiliki faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Menurut hasil penelitian Nitikesari (2005), faktor-faktor tersebut di antaranya adalah tingkat pendidikan, penempatan tempat sampah di dalam rumah, keberadaan pemulung, adanya aksi kebersihan, adanya peraturan tentang persampahan dan penegakan hukumnya. Tingkat partisipasi masyarakat perkotaan dalam menangani sampah secara mandiri masih dalam katagori sedang sampai rendah, masyarakat masih enggan melakukan pemilahan sampah. Oleh karenanya pemerintah setempat perlu untuk memberikan perhatian khusus dalam melakukan pengelolaan sampah agar pada pelaksanaan nantinya dapat berhasil. Pada intinya untuk menangani permasalahan sampah yang semakin hari semakin sulit untuk dikelola, disamping dibutuhkan kesadaran dari masyarakat dan pengembangan teknologi serta perubahan model pengelolaan sampah, pemberdayaan partisipasi masyarakat merupakan usaha alternatif untuk memelihara lingkungan yang sehat dan bersih serta dapat memberikan manfaat lain.

D. Koordinasi dan Keterpaduan

1. Koordinasi

Koordinasi pada hakekatnya merupakan upaya memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.

Adanya berbagai pendapat yang berbeda diantara masing-masing individu dalam organisasi akan memengaruhi keputusan yang diambil. Koordinasi yang baik dapat dilakukan jika masing-masing individu menyadari dan memahami akan tugas-tugas mereka. Mereka harus mengetahui bahwa sebenarnya tugas mereka sangat membantu pada usaha-usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

a. Teori koordinasi :

a. Menurut Syamsi (1994) dikutip dari E. F. L. Brech:

Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

b. Menurut Syamsi (1994) dikutip dari G. R. Terry:

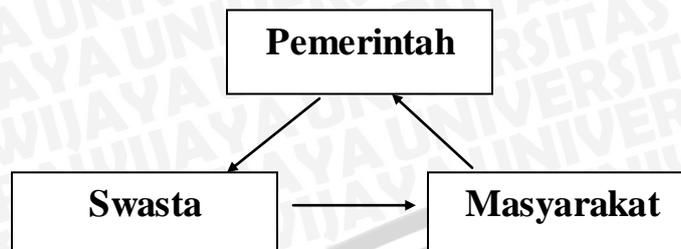
Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron / teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

b. Syarat-syarat koordinasi :

1. Perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per bagian.
2. Dalam perusahaan besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba untuk kemajuan.
3. Satu sama lain per bagian harus saling menghargai.
4. Bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.

c. Koordinasi dibedakan atas :

1. Koordinasi vertikal, tindakan-tindakan atau kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.



2. Koordinasi horisontal, tindakan-tindakan atau kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat.

Koordinasi horisontal terbagi :

- a. *Inter-Diciplinary*, koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan, mewujudkan, menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.
- b. *Inter-Related*, koordinasi antar badan (instansi). Unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansinya saling berkaitan secara intern-ekstern yang selevel.

d. Cara mengadakan koordinasi :

1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan, menghasilkan koordinasi yang diharapkan.
2. Mensosialisasikan tujuan kepada para anggota, agar tujuan tersebut berjalan secara bersama, tidak sendiri-sendiri.
3. Mendorong anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, dll.
4. Mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran.

e. Prinsip-Prinsip Koordinasi

Dalam mengadakan koordinasi diperlukan suatu pegangan yang berupa prinsip-prinsip. Koordinasi antar bagian dan antar individu di dalam organisasi akan dapat tercapai dengan baik bilamana diikuti dengan tiga prinsip koordinasi sebagai berikut:

1. Prinsip Kontak Langsung

Prinsip ini menyatakan bahwa koordinasi harus dicapai melalui hubungan antar manusia baik hubungan secara horizontal maupun vertical. Dalam hubungan langsung tersebut dapat terjadi pertukaran gagasan, pendapat, harapan dan sebagainya: cara ini dianggap lebih sempurna dibandingkan dengan cara-cara lain. Semua pendapat bisa dikemukakan secara lebih detail sehingga memungkinkan untuk diperolehnya saling pengertian yang mendalam.

2. Prinsip Penekanan Pada Pentingnya Koordinasi

Kurang baiknya koordinasi yang dapat menimbulkan kesimpangsiuran di dalam organisasi. Selain itu, koordinasi yang baru diadakan kemudian juga dapat menghambat jalannya organisasi. Oleh karena itu koordinasi perlu dilakukan sejak membuat perencanaan sampai melaksanakan kebijakan. Jika suatu perencanaan sudah dilaksanakan, maka sulit untuk menarik / mencabutnya kembali. Bilamana pencabutan tersebut berhasil dilakukan, ada kemungkinan bahwa tindakan itu dapat menimbulkan berbagai masalah. Sebagai contoh, bagian keuangan secara mendadak mengadakan pengetatan kredit tanpa memberitahukan bagian penjualan. Tentu saja tindakan ini akan menimbulkan kesulitan baik pada bagian penjualan itu sendiri maupun pada bagian atau pihak lain diluar organisasi.

3. Hubungan Timbal Balik Di Antara Faktor-Faktor Yang Ada

Masing-masing individu yang bekerja bersama-sama dalam kondisi pekerjaan tertentu, akan saling memberikan pengaruh antara yang satu dengan yang lainnya. Kondisi, Kondisi, tujuan dan macam pekerjaan yang sama memungkinkan bagi mereka untuk mengadakan hubungan secara rutin, baik didalam bagian maupun antar bagian. Orang-orang yang berada pada penelitian pasar misalnya, akan dipengaruhi oleh orang-orang dari bagian penjualan, keuangan dan bagian produksi; dan mereka juga mempengaruhi orang-orang yang bekerja pada bagian-bagian tersebut. Kerjasama yang baik dapat dilakukan jika masing-masing individu saling memahami tugas-tugas mereka. Oleh karena itu mereka harus membuka kesempatan untuk saling mempertukarkan informasi.

2. Keterpaduan

Keterpaduan berasal dari kata padu yang berarti utuh dan kuat serta kompak, yang kemudian mendapat imbuhan ke-, ter-, an yang berarti suatu keutuhan yang kuat dan menyatu dalam hubungannya. (Kamus Umum Bahasa Indonesia 1998)

Dahuri dkk (1996) berpendapat bahwa keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan hendaknya dilakukan pada tiga tataran (level), yaitu teknis, konsultatif dan koordinasi. Pada tataran teknis, segenap pertimbangan teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan hendaknya secara seimbang atau proporsional dimasukkan kedalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sampah. Pada tataran konsultatif, segenap aspirasi dan kebutuhan para pihak yang terlibat (*stakeholders*) atau terkena dampak dalam pengelolaan sampah tersebut hendaknya diperhatikan sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaannya. Sedangkan pada tataran yang terakhir yaitu tataran koordinasi mensyaratkan diperlukannya kerjasama yang harmonis antar semua pihak yang terkait dengan manajemen pengelolaan sampah, baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat umum.

Seringkali keterpaduan juga diartikan sebagai koordinasi antara tahapan pembangunan yang meliputi pengumpulan dan analisis data, perencanaan, implementasi dan kegiatan konstruksi.

Dalam pengertiannya, menurut (Dahuri, dkk, 1996) keterpaduan memiliki dua dimensi, yaitu:

1. dimensi sektoral, dan
2. dimensi bidang ilmu

Keterpaduan sektor merupakan sektor yang paling penting karena pada keterpaduan ini diperlukan koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antara sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (*horizontal integration*) dan antara tingkat pemerintah mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan propinsi sampai tingkat pusat (*vertical integration*). Sedangkan keterpaduan dari sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam pengelolaan sampah hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin

ilmu yang melibatkan ilmu: ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum dan ilmu lainnya yang relevan. Hal ini wajar karena dalam pengelolaan sampah, pada dasarnya terdiri dari sistem sosial yang terjalin secara kompleks dan dinamis. (Dahuri, dkk, 1996).

Mengingat bahwa suatu pengelolaan (*management*) terdiri dari 3 tahap utama, yaitu perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, maka jiwa/nuansa keterpaduan tersebut perlu diterapkan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi.

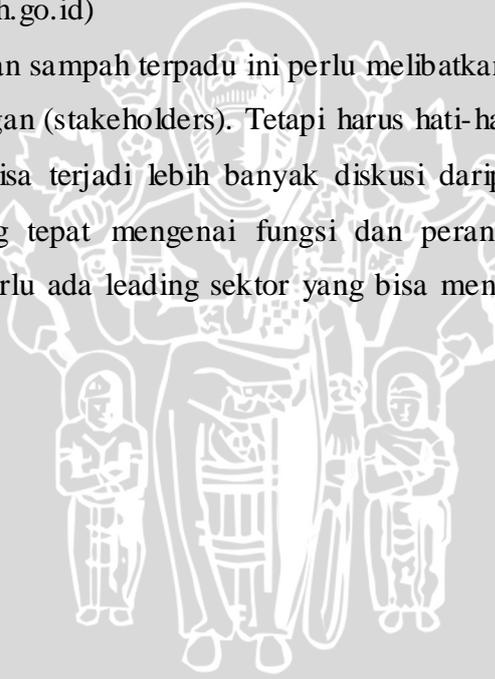
Dalam hal ini keterpaduan pengelolaan sampah yang dilakukan adalah pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat yang artinya suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan (jika feasible), dikontrol dan dievaluasi bersama masyarakat. Berbasis masyarakat bukan berarti dalam pengoperasiannya selalu harus dilakukan oleh masyarakat, tetapi boleh juga dilakukan oleh lembaga atau badan profesional yang mampu dan diberi mandat oleh masyarakat. Yang penting adalah apa yang layak dan realistis dilakukan untuk memecahkan masalah sampah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Misalnya kalau secara realistis masyarakat tidak mampu dari sisi waktu dan manajemen untuk mengoperasikan maka jangan diserahkan pengoperasiannya pada masyarakat. Lebih baik masyarakat didorong untuk mencari dan menunjuk lembaga profesional atau perorangan yang mampu dan dipercaya untuk mengoperasikan. Dalam pengertian ini pemeran (penguasa, kekuatan) utama dalam pengelolaan sampah adalah masyarakat, bukan pemerintah atau lembaga lainnya seperti LSM dan lain-lain. Pemerintah dan lembaga lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator.

Fungsi motivator disini adalah memberikan dorongan agar masyarakat siap memikirkan dan mencari jalan keluar terhadap persoalan sampah yang mereka hadapi. Tetapi jika masyarakat belum siap, maka fungsi pemerintah atau lembaga lain adalah menyiapkan terlebih dahulu. Misalnya dengan melakukan pelatihan, study banding dan memperlihatkan contoh-contoh program yang sukses dan lain-lain. Sedangkan fungsi dari fasilitator adalah memfasilitasi masyarakat untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah secara baik dan berkesinambungan. Jika

masyarakat mempunyai kelemahan dibidang teknik pemilahan dan pengomposan maka tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan masyarakat dengan berbagai cara misalnya dengan memberikan pelatihan, begitu juga jika masyarakat lemah dalam hal pendanaan.

Sistem pengelolaan sampah terpadu yang dimaksud mesti merupakan sistem manajemen yang berbasis pada masyarakat yang diawali dengan pendidikan lingkungan, disiplin dan itikad baik untuk mengurangi jumlah sampah yang diproduksi setiap hari serta dimulai dari tingkat rumah tangga. Peranan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan aspek yang terpenting untuk diperhatikan dalam sistem pengelolaan sampah secara terpadu. (www.sumapapua.menlh.go.id)

Program pengelolaan sampah terpadu ini perlu melibatkan semua pihak yang terkait dan berkepentingan (stakeholders). Tetapi harus hati-hati sebab jika terlalu banyak yang terlibat bisa terjadi lebih banyak diskusi daripada bekerja. Perlu dilakukan analisa yang tepat mengenai fungsi dan peran stakeholder. Oleh karenanya di Pemda perlu ada leading sektor yang bisa mengkoordinasikan dan memimpin program.



BAB III METODE PENELITIAN

Menurut Koentjaraningrat (1991:7) "Metode dalam arti kata sesungguhnya maka metode (Yunani: *Methodos*) adalah cara atau jalan". Sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmiah yang bersangkutan. Jadi metode penelitian merupakan pedoman atau cara dalam melakukan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis agar dapat memperoleh hasil yang obyektif, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan demikian penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara tepat dan jelas mengenai sifat-sifat atau keadaan, situasi, kondisi, gejala atau perkembangan gejala dalam hubungan dengan obyek penelitian tersebut tentang adanya koordinasi atau sinergitas antara pihak-pihak yang terkait disini dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto yaitu pemerintah lokal, swasta dan masyarakat setempat

Ada beberapa alasan yang mendasari peneliti untuk menggunakan metode kualitatif, seperti yang dikemukakan Moleong (2007:31), antara lain:

1. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat deskripsi obyektif tentang fenomena yang sifatnya terbatas dan dapat dikontrol melalui beberapa intervensi. Dalam hal ini, peneliti mencoba mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhatikan konteks yang relevan.
2. Menjelaskan penyebab fenomena sosial melalui pengukuran yang obyektif. Sedangkan tujuan penelitian ini lebih pada upaya untuk memahami fenomena sosial dan memperbanyak pemahaman yang sifatnya mendalam.
3. Strategi yang digunakan pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan dokumen, wawancara, serta mencatat data secara intensif.

Selain itu, ada satu pertimbangan lain tentang penelitian kualitatif sesuai dengan pendapat Moleong (2007:9), yaitu metode kualitatif lebih peka dan lebih

dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena dengan penelitian deskriptif peneliti dapat menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada secara aktual serta mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengkajian hipotesa.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah tahap awal lingkup permulaan yang dipilih sebagai wilayah penjelasan umum dalam tahap pertama pelaksanaan penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran umum atau menyeluruh tentang subyek atau situasi yang diteliti. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan (Moleong, 2007:116). Artinya, peneliti melakukan pemilihan data dari seluruh data yang masuk untuk memastikan relevansi data yang dibutuhkan, atau data yang diperlukan. Namun bukan berarti data yang tidak relevan kemudian dibuang, karena suatu saat data tersebut akan dipergunakan sebagai data pendukung.

Pembatasan fokus akan sangat penting berkaitan dengan masalah maupun data yang akan dikumpulkan dan diolah untuk dianalisa. Maka agar penelitian ini nantinya lebih terarah dan mudah dalam hal pencarian data, terlebih dahulu harus ditetapkan fokusnya.

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto
 - a. Kegiatan perencanaan
 - b. Kegiatan pengorganisasian / kelembagaan
 - c. Kegiatan pelaksanaan

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto
 - a. Faktor internal, dan
 - b. Faktor eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Mojokerto, sedangkan yang menjadi situs pada penelitian ini adalah Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan sampah yaitu TPS dan TPA di Kabupaten Mojokerto.

Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan lokasi tersebut sebagai situs penelitian karena sebagai acuan untuk melihat sejauh mana pengelolaan sampah yang telah dilakukan dan partisipasi masyarakat disekitarnya, disamping untuk mempertahankan predikat bahwa Mojokerto sebagai kota Adipura (Kota Bersih) saat ini yang diperoleh selama 2 tahun berturut-turut dan juga hal ini dikarenakan jumlah penduduk di Mojokerto yang semakin padat. Bertambah padatnya penduduk ini tidak lain dikarenakan banyak tumbuhnya industri-industri kecil seperti sepatu dan sandal serta industri-industri besar seperti pabrik gitar chord dan pabrik bir bintang di daerah Ngoro Industri. Tumbuhnya industri ini menyebabkan Mojokerto menjadi kota pilihan sebagian orang dari berbagai daerah sebagai tempat untuk mengadu nasib dalam mencari lapangan pekerjaan. Hal inilah yang pada akhirnya bisa menimbulkan permasalahan berupa penumpukan jumlah sampah karena kita ketahui bahwa pembangunan yang terus berkembang pasti akan menimbulkan sampah. Jika tidak dikoordinir dengan baik, maka permasalahan ini akan menjadi sangat serius sehingga perlu untuk ditindak lanjuti lebih dalam lagi oleh Pemerintah khususnya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, maka perlu ditetapkan sumber-sumber data. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian menurut

Lofland dalam Moleong (2007: 157) ialah kata-kata dan tindakan yang diamati oleh peneliti dilapangan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua macam:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan karena berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Data primer ini disebut juga data asli yang berupa kata-kata yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan berbagai sumber. Sumber Data Primer Yaitu data yang diperoleh dari interview atau bertanya secara langsung. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari:

- a) Pejabat atau pegawai yang ada pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto sebagaimana yang dilakukan di lapangan.
- b) Masyarakat yang berada di sekitar TPS dan TPA Kabupaten Mojokerto juga sebagai mana yang dilakukan di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada dimana data tersebut merupakan hasil kegiatan orang lain. Sumber data ini antara lain berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan, serta arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan catatan yang dapat memberikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban ini masih harus diuji secara empiris, dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data.

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian ilmiah, karena data yang dihasilkan ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab dan memecahkan masalah yang ada. Oleh karena itu data tersebut harus valid dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Interview/ wawancara

Teknik pengumpulan ini yaitu dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan narasumber, yaitu yang berada di lapangan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Nara sumber tersebut yakni adalah orang-orang yang mana telah diungkapkan peneliti pada bagian sumber data primer di bagian sebelumnya dari karya tulis ini.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat secara langsung yang menjadi obyek penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (1994: 144) bahwa observasi sebagai pengumpul data diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan sebenarnya tanpa ada usaha yang sengaja untuk melakukan atau mempengaruhi dan memanipulasinya. Observasi yang dilakukan penulis yakni dengan mendatangi masyarakat yang berada di sekitar TPS dan TPA di Mojosari sebagai acuan untuk memperoleh data dilapangan dan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto yang namanya telah peneliti kemukakan pada bagian sumber data primer pada karya tulis ini. Hal ini dilakukan agar peneliti bisa membandingkan keadaan sebenarnya dengan hasil wawancara sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang valid.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mencatat dan memanfaatkan data-data yang ada di instansi yang semua data-data tersebut berkaitan berkaitan dengan penelitian yang berupa dokumen atau catatan-catatan.

F. Analisa Data

Setelah data dilapangan terkumpul, maka peneliti mengolah data dengan menggunakan teknik yang sesuai untuk mendapatkan pemecahan masalah yang diteliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, yaitu mendapatkan gambaran tentang bagaimana pengelolaan sampah secara terpadu yang dilakukan oleh para stakeholder yang terkait dan untuk menganalisa faktor internal dan eksternal pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto.

Miles dan Huberman mempergunakan paparan data untuk menganalisis pekerjaan penelitian kualitatif. Mereka menyebut penyajian data (*data display*) sebagai seperangkat data dan informasi terorganisasi yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan menentukan tindakan. (Miles dan Huberman, 1992: 77).

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif. Model ini bergerak pada tiga komponen yaitu: reduksi data, sajian data dan kesimpulan, kemudian dianalisa dalam bentuk interaktif pada ketiga komponen tersebut. Berikut adalah ketiga komponen tersebut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal – hal yang pokok, difokuskan pada hal – hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus–menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

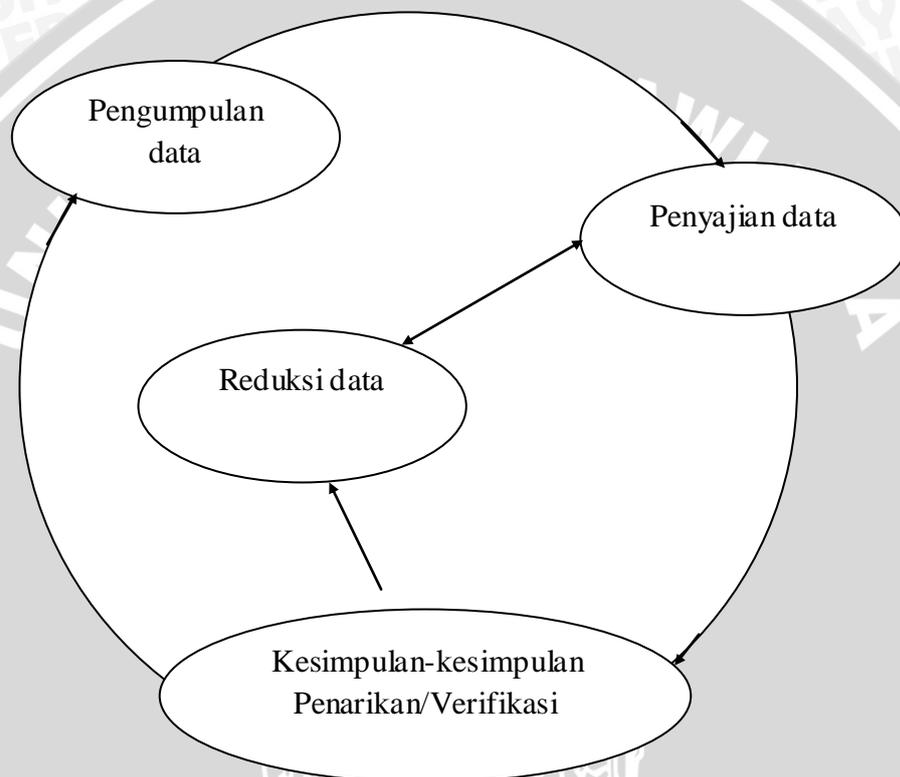
Penyajian/display data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan/bagian-bagian tertentu dari penelitian. Selain itu display data juga berfungsi sebagai daftar yang bisa secara cepat menunjukkan cakupan data yang telah dikumpulkan.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi dilakukan secara terus–menerus sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal

yang timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih tentative, tetapi dengan bertambahnya data akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”.

Bagan 2
Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)

Pengumpulan data dilakukan paling awal. Data terkumpul disajikan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan melalui proses reduksi data. Jika data yang tereduksi belum memenuhi kriteria yang telah ditentukan maka kembali lagi pada proses reduksi data. Tetapi jika data yang disajikan sudah cukup memenuhi kriteria yang sesuai dengan fokus penelitian maka dilanjutkan pada penarikan kesimpulan dan verifikasi dari hasil penyajian data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto

a. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Mojokerto terletak di antara 1110 20'13" sampai dengan 1110 40'47" bujur timur dan antar 7018'35" sampai dengan 70 47" lintang selatan. Secara geografis Kabupaten Mojokerto tidak berbatasan dengan pantai, hanya berbatasan dengan wilayah Kabupaten lainnya :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik
2. Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat : Kabupaten Jombang

Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung di tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan yang subur, meliputi Kecamatan Pacet, trawas, Gondang dan jatirejo. Bagian tengah merupakan wilayah dataran, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang kurang subur.

Sekitar 30% dari seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan tingkat kemiringan lahan kurang dari 15 derajat. Letak ketinggian kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Mojokerto rata-rata berada dibawah 500 m dari permukaan laut, kecamatan yang memiliki ketinggian tertinggi di Kabupaten Mojokerto adalah Kecamatan pacet, dimana ketinggiannya berada pada 700 m dari permukaan laut.

Berdasarkan penggunaan dan kondisi lahan yang ada, Kabupaten Mojokerto mengembangkan wilayahnya dalam tiga bagian, yaitu: barat, timur, dan tengah.

1. Bagian barat merupakan wilayah yang berkarakteristik pertanian serta masih bersifat relatif rural. Pengembangan daerah ini berpusat di Kecamatan Pacet

2. Di sebelah timur yang berkarakteristik urban, pengembangannya terpusat di Kecamatan Ngoro.
3. Dan di wilayah tengah yang merupakan jantung kota, pengembangannya dipusatkan di Kecamatan Mojosari.

Secara administratif wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, 304 desa. Luas wilayah secara keseluruhan Kabupaten Mojokerto adalah 692,15 km², dimana bila kita amati wilayah Kecamatan Dawarblandong merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar dimana pada daerah ini banyak tumbuh perbukitan dan lahan hijau yang luas

b. Kondisi Demografis

Dengan luas wilayah sekitar 692,15 km², Kabupaten Mojokerto memiliki populasi 969.000 jiwa. Masyarakat kabupaten Mojokerto menurut mata pencahariannya dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri/TNI : 9.646 (jiwa)
2. Pegawai perusahaan swasta : 41.431 (jiwa)
3. Pedagang/pengusaha : 6.370 (jiwa)
4. Petani/peternak : 769.346 (jiwa)
5. Lainnya (pertambangan, TKI) : 1422 (jiwa).

Di kabupaten ini terdapat beberapa perusahaan besar seperti PT. Ajinomoto Indonesia, PT. Multi Bintang, serta pabrik rokok yang dikelola koperasi unit desa dan merupakan mitra perusahaan rokok sampoerna. Industri kecil di Kabupaten ini juga cukup berkembang. kecamatan Sooko terkenal sebagai sentra industri sepatu dan sandal, kecamatan Trowulan terkenal dengan kerajinan kemasan dan perak serta patung batu. kecamatan Bangsal terkenal dengan krupuk rambaknya dan juga sekolah polisi negara. Sektor pertanian juga turut berkembang sebagai penyuplai bahan baku. Tebu misalnya, dapat menjadi bahan baku penyedap masakan dan minyak spiritus. Bambu digunakan sebagai bahan baku industri joss paper yang di ekspor ke Taiwan dan Cina.

Karena letaknya yang cukup strategis, 50 km arah barat Kota Surabaya, daerah ini menjadi *hinterland* kota metropolitan dan termasuk dalam Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Daerah ini merupakan kelompok kawasan yang menyangga Kota Surabaya. Sebagai daerah penyangga, roda perekonomian wilayah ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi di Surabaya. Oleh karena itu mata pencaharian penduduk sebagian besar cenderung ke arah lapangan usaha perdagangan, angkutan dan industri pengolahan. Kegiatan perdagangan bersama hotel dan restoran pada tahun 2009 menghasilkan Rp 215 milyar dari total kegiatan ekonomi kota yang mencapai Rp 626,2 milyar. Dari sektor angkutan diperoleh Rp 109 milyar dan dari sektor industri pengolahan mencapai Rp 97,7 milyar. Usaha perdagangan sendiri, tanpa hotel dan restoran, menghasilkan Rp 157,6 milyar. Adapun komoditas yang diperdagangkan pada umumnya merupakan barang-barang hasil produksi industri pengolahan, terutama industri pengolahan tekstil, barang kulit, dan alas kaki.

Di Mojokerto terdapat kecamatan Trowulan, yang disinyalir sebagai pusat dari Kerajaan Majapahit, terlihat dari banyak sisa peninggalan sejarah kerajaan tersebut dijumpai di sana. Trowulan adalah daya tarik utama wisata sejarah di kabupaten ini, karena terdapat puluhan candi-candi peninggalan Kerajaan Majapahit, makam raja-raja Majapahit, serta Pendopo Agung yang berada tepat di pusat istana Majapahit.

Sedangkan bagian selatan Kabupaten Mojokerto berupa pegunungan, dengan puncak Gunung Welirang (3.156 m) dan Gunung Anjasmoro (2.277 m). Kabupaten Mojokerto juga memiliki sejumlah obyek wisata menarik. Kawasan pegunungan di selatan ini juga merupakan kawasan wisata andalan, di antaranya Pemandian Air Panas di Pacet dan vila-vila peristirahatan di Trawas.

Hal lain adalah perkembangan industri kecil di Mojokerto, antara lain: Kecamatan Soko terkenal sebagai sentra industri sepatu dan sandal, Kecamatan Trowulan terkenal dengan kerajinan emas, perak, dan patung batu. Kecamatan Bangsal terkenal dengan krupuk rambaknya dan juga sekolah polisi negara.

2. Profil Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto

a. Lokasi Dinas

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan salah satu dinas di Kabupaten Mojokerto yang menaungi masalah permasalahan sampah. Namun semenjak perubahan dinas ini dari Dinas Kebersihan dan Perumahan menjadi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, tugas dari dinas ini pun tidak hanya untuk menanggulangi masalah sampah di wilayahnya tetapi juga memperhatikan tentang menjaga keindahan tata ruang kota dengan upaya pemberihan sarana dan prasarana seperti penerangan lampu jalan.

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto beralamat di Jalan Pemuda no. 65 Mojosari. Letak dari dinas ini yang strategis yaitu dekat dengan pusat kota yang hanya berjarak sekitar 4 Km memudahkan para personil dinas untuk memberikan pelayanannya kepada masyarakat serta memantau para personilnya dalam bekerja. Namun dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat, para personil dinas harus tetap memperhatikan dasar hukum yang telah disepakati agar pelayanan yang diberikan bisa benar-benar menjadi maksimal.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur Pemerintahan dan Organisasi Dinas Kabupaten Mojokerto
- b. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto
- c. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/946/416-109/2009 tentang Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto

c. Visi dan Misi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung keberhasilan pembangunan perekonomian di Kabupaten Mojokerto. Adapun visi dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto adalah **“Menciptakan dan mewujudkan infrastruktur Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan antara Perdesaan dan Perkotaan“**

Penjelasan Visi :

1. Dengan semakin meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat, sehingga menuntut untuk tercukupinya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak, sehat, dan berwawasan lingkungan.
2. Hunian masyarakat yang memenuhi kebutuhan di masa mendatang membuka peluang terciptanya pengembangan dan operasional infrastruktur wilayah desa dan kota yang berwawasan lingkungan.

Adapun misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga serta dana untuk mendukung kegiatan.
2. Meningkatkan perencanaan, pelayanan, dan pelaksanaan pengawasannya.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman masyarakat yang layak, sehat, dan berwawasan lingkungan.
4. Memelihara penghijauan dan keindahan kota.
5. Meningkatkan fungsi operasional kendaraan angkutan sampah, PJU, taman dan PMK yang layak.

Penjelasan Misi :

Agar perwujudan dari visi tercapai dengan baik dan sesuai harapan, diperlukan perumusan, perencanaan kebijakan teknis operasional pembangunan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung bidang Ke-Cipta Karya-an. Kebijakan teknis bidang ke-Cipta Karya-an berupa:

kegiatan perencanaan, pelayanan, pengawasan, dan pengendalian teknis untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman serta pemeliharaan kebersihan dan pertamanan yang berwawasan lingkungan.

d. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Tujuan ini merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat dicapai dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran ini diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto dapat diperinci sebagai berikut:

Tujuan :

1. Meningkatkan fungsi penghijauan kota.
2. Meningkatkan keindahan dan kebersihan kota.
3. Meningkatkan pelayanan operasional kendaraan angkutan sampah, PJU, Kebersihan dan Pertamanan, dan PMK terhadap masyarakat.

Sasaran :

1. Terwujudnya fungsi ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota.
2. Terwujudnya kondisi lingkungan yang bersih, hijau, dan berwawasan lingkungan.
3. Terwujudnya pelayanan terhadap masyarakat akan sampah, PJU, kebersihan dan pertamanan, dan PMK.

e. Kebijakan pada Dinas

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk Kebijakan dan Program. Kebijakan dan Program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu

5 (lima) tahun dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN / APBD maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi.

Kebijakan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

- a. Kebijakan perencanaan tata ruang
- b. Kebijakan peningkatan fasilitas fungsi ruang terbuka hijau.
- c. Kebijakan peningkatan keindahan dan kebersihan kota yang berwawasan lingkungan.

f. Kedudukan dan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur Pemerintahan dan Organisasi Dinas Kabupaten Mojokerto yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto.

Oleh karenanya, organisasi dan tata kerja yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto diatur dalam struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bidang, sub bagian, dan seksi yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

Mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi program.

Bagian ini terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program

3. Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi tata bangunan, jasa konstruksi, serta perencanaan teknis. Bagian ini terdiri dari:

- a. Seksi Tata Bangunan
- b. Seksi Jasa Konstruksi
- c. Seksi Perencanaan Teknis

4. Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi tata perumahan, penyehatan lingkungan, serta tata ruang. Bagian ini terdiri dari:

- a. Seksi Tata Perumahan
- b. Seksi Penyehatan Lingkungan
- c. Seksi Tata Ruang

5. Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi pengelolaan persampahan, pengelolaan pertamanan, pengelolaan air kotor. Bagian ini terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Persampahan
- b. Seksi Pengelolaan Pertamanan
- c. Seksi Pengelolaan Air Kotor

6. Bidang Angkutan dan Peralatan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi angkutan, peralatan, serta perbengkelan. Bagian ini terdiri dari:

- a. Seksi Angkutan
- b. Seksi Peralatan
- c. Seksi Perbengkelan

Dari keseluruhan bidang diatas, bidang yang paling memiliki peran paling penting dalam pengelolaan sampah disini yaitu bidang kebersihan dan pertamanan karena semua tugas yang berurusan dengan masalah sampah ditangani oleh bidang ini. Oleh karenanya dalam menciptakan suasana kota yang bersih, indah dan nyaman, serta menyelenggarakan kegiatan organisasi yang lain harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Aspek sumber daya terdiri dari sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Melihat dari hal tersebut, maka sudah seharusnya Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto untuk lebih meningkatkan kemampuan para personilnya khususnya di bidang kebersihan dan pertamanan. Sebagai gambaran berikut ini adalah jumlah PNS Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto yang dirinci berdasarkan Pangkat/Golongan, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

TABEL I
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2009

	Gol IV (org)	Gol III (org)	Gol II (org)	Gol I (org)	Jumlah (org)
Jan	8	42	38	35	123
Peb	8	41	38	35	122
Mar	6	35	36	34	111
Apr	6	35	36	34	111
Mei	6	35	36	34	111
Jun	6	36	51	41	134
Jul	6	37	49	41	133
Agust	6	37	49	41	133
Sept	6	35	49	41	131
Okt	6	35	49	41	131
Nop	6	35	49	41	131
Des	6	35	48	41	130

Sumber: LAKIP Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto

Tabel diatas merupakan tabel jumlah PNS Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto. Tabel tersebut merupakan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Mojokerto. Pada gol. IV dan gol. III terjadi pengurangan pegawai karena gol. tersebut merupakan pejabat di dinas sedangkan untuk gol. II dan gol. I terjadi peningkatan karena pada gol. tersebut kebanyakan adalah staf pembantu dinas. Oleh karena itu dinas

memperbanyak staf pembantu untuk membantu kinerja dari para kepala bagian di dinas agar pekerjaan dapat terlaksana keseluruhannya.

g. Komponen Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah di Kab. Mojokerto dikelola oleh DPU Cipta Karya dan Tata Ruang dengan *Integrated System* atau sistem terpadu. Adapun data tentang pengelolaan sampah di Kab. Mojokerto sebagai berikut:

Tabel 2
Data Pengumpulan Sampah DPU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Mojokerto

No.	Uraian	Keterangan
1.	Nama Pengelola	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto
2.	Sistem	<i>Integrated System</i> /Sistem Terpadu
3.	Jumlah Penduduk	969.000 jiwa
4.	Asumsi produksi sampah m ³ /hr	1938
5.	Jumlah sampah m ³ /hr	1900
6.	Jumlah pelayanan m ³ /hr	1790
7.	Cakupan layanan geografis Ha	1500 Ha
8.	Cakupan layanan penduduk Jiwa	850.000
9.	Ilegal Dumping	Sedang

Sumber : Karakter Sampah & Struktur Manajemen Penanganan Sampah DPU Cipta Karya Kabupaten Mojokerto Tahun 2009

Tabel diatas merupakan tabel data pengumpulan sampah yang dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Mojokerto dengan melakukan *integrated system* atau sistem terpadu. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata masih belum bisa mencakup keseluruhan dari wilayah Kabupaten Mojokerto itu sendiri. Adapun data jumlah pelayanan di TPA sebagai berikut:

Tabel 3
Data TPA Mojosari, Kabupaten Mojokerto

No.	Uraian	Keterangan
1.	Nama TPA	TPA Mojosari
2.	Status TPA	Milik Pemda
3.	Luas TPA	10 Ha
4.	Kapasitas	5000 m ³
5.	Jumlah pelayanan TPA	1790 m ³ /hr
6.	Sistem	<i>Open Dumping</i>
7.	Jarak ke permukiman	10 Km
8.	Incenerator Unit	1
9.	Nama pengelola	Bremen Overceace Research Development Association (BORDA)

Sumber : Karakter Sampah & Struktur Manajemen Penanganan Sampah DPU Cipta Karya Kabupaten Mojokerto, tahun 2009

Data diatas merupakan data pelayanan kebersihan yang mampu diberikan oleh TPA Mojosari dalam melakukan pengelolaan sampah. Pada pelayanan pengelolaan sampah di TPA Mojosari ini, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang bekerjasama dengan pihak swasta yaitu organisasi bantuan dari negara Jerman untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah di Indonesia yaitu BORDA.

Tabel 4
Data Peralatan TPA

No.	Nama Peralatan	Jumlah
1.	Bulldozer	2 unit
2.	Back Hoe	2 unit
3.	Loader	1 unit
4.	Water Tank	2 unit

Sumber : Karakter Sampah & Struktur Manajemen Penanganan Sampah DPU Cipta Karya Kabupaten Mojokerto, tahun 2009

Data diatas merupakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang untuk menaggulangi permasalahan sampah khususnya di daerah Kabupaten Mojokerto demi menciptakan suasana kota yang bersih, indah dan nyaman. Namun dari keseluruhan hal tersebut, penting untuk ditunjang oleh adanya partisipasi dari masyarakat sekitar dalam menanggulangi permasalahan sampah ini untuk bersama-sama dengan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang menanggulangi permasalahan sampah di Kabupaten Mojokerto.

3. Pengelolaan Sampah Yang Dilakukan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto

a. Kegiatan Perencanaan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dibidang kebersihan dalam pengelolaan sampah tentunya diperlukan perencanaan pengelolaan sampah yang baik. Dengan penanganan dan pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan perencanaan yang ramah lingkungan, efektif, efisien, tentunya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan baik dan berjalan lancar.

1. Tahap-Tahap Kegiatan Perencanaan

a. Analisis Situasi Sasaran

Langkah pertama yang diambil oleh dinas sebelum membuat suatu perencanaan adalah melakukan analisis situasi sasaran. Hasil dari langkah ini adalah tantangan (ketidaksesuaian) antara keadaan sasaran sekarang dengan sasaran yang diharapkan. Besar kecilnya ketidaksesuaian antara sasaran saat ini dan situasi sasaran yang diharapkan memberitahukan tentang besar kecilnya tantangan (loncatan).

Berdasarkan data dokumentasi yang ada, terdapat tiga sasaran yang ingin ditingkatkan pada dinas ini yakni :

1. Terwujudnya fungsi ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota.
2. Terwujudnya kondisi lingkungan yang bersih, hijau, dan berwawasan lingkungan.
3. Terwujudnya pelayanan terhadap masyarakat akan sampah, PJU, kebersihan dan pertamanan, dan PMK.

Untuk melakukan analisis situasi sasaran (output) ini, kepala dinas mengharapkan kerja sama dari pihak swasta dan masyarakat untuk bekerja sama dengan dinas untuk mau memelihara kebersihan lingkungannya guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Zaenal sebagai Kepala Dinas sebagai berikut:

“Perencanaan merupakan langkah pertama dalam proses manajemen yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui semua unsur-unsur organisasi. Saya selaku kepala dinas menganalisis setiap kegiatan yang dilakukan pada dinas dalam rangka melakukan pengelolaan sampah yang baik dan meningkatkan kebersihan lingkungan. Dan disamping itu saya mengharapkan agar pihak-pihak yang berkaitan baik swasta maupun masyarakat mampu bekerjasama dengan dinas agar dinas mampu melaksanakan sasaran yang telah ditetapkan tadi.”

(Wawancara tanggal 11 Mei 2010 pukul 08.05 WIB di kantornya)

b. Merumuskan Sasaran

Setelah menganalisis situasi sasaran, maka dirumuskanlah sasaran yang akan dicapai. Dan meskipun sasaran didasarkan pada hasil analisis situasi, namun harus tetap mengacu pada visi, misi dan tujuan dinas sebagai sumber pengertian bagi perumusan sasaran.

1. Visi Dinas

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung keberhasilan pembangunan perekonomian di Kabupaten Mojokerto. Adapun visi dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto adalah “Menciptakan dan mewujudkan infrastruktur Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan antara Perdesaan dan Perkotaan”.

Penjelasan Visi :

- 1.1 Dengan semakin meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat, sehingga menuntut untuk tercukupinya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak, sehat, dan berwawasan lingkungan.

- 1.2 Hunian masyarakat yang memenuhi kebutuhan di masa mendatang membuka peluang terciptanya pengembangan dan operasional infrastruktur wilayah desa dan kota yang berwawasan lingkungan.

2. Misi Dinas

Adapun misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto adalah :

- 2.1 Meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga serta dana untuk mendukung kegiatan.
- 2.2 Meningkatkan perencanaan, pelayanan, dan pelaksanaan pengawasannya.
- 2.3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman masyarakat yang layak, sehat, dan berwawasan lingkungan.
- 2.4 Memelihara penghijauan dan keindahan kota.
- 2.5 Meningkatkan fungsi operasional kendaraan angkutan sampah, PJU, taman dan PMK yang layak.

Penjelasan Misi :

Agar perwujudan dari visi tercapai dengan baik dan sesuai harapan, diperlukan perumusan, perencanaan kebijakan teknis operasional pembangunan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung bidang Ke-Cipta Karya-an. Kebijakan teknis bidang ke-Cipta Karya-an berupa: kegiatan perencanaan, pelayanan, pengawasan, dan pengendalian teknis untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman serta pemeliharaan kebersihan dan pertamanan yang berwawasan lingkungan.

3. Tujuan Dinas

Bertolak dari visi dan misi diatas, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 3.1 Meningkatkan fungsi penghijauan kota.
- 3.2 Meningkatkan keindahan dan kebersihan kota.
- 3.3 Meningkatkan pelayanan operasional kendaraan angkutan sampah, PJU, Kebersihan dan Pertamanan, dan PMK terhadap masyarakat.

2. Proses Perencanaan Pengelolaan sampah

Proses perencanaan pengelolaan sampah dalam rangka peningkatan kebersihan kota dilakukan pihak dinas dengan unsur-unsurnya yang membuat rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang beserta program-program kerja guna merealisasikan rencana peningkatan kebersihan Kabupaten Mojokerto.

Pernyataan diatas sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Totok sebagai Kepala Seksi Pengolahan Persampahan:

“Rencana yang dibuat harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang peningkatan kebersihan kota dan program pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan kesiapan SDM serta sarana yang ada di Dinas PU Cipta Karya dan Tata ruang dan dibuat skala prioritas untuk jangka menengah, jangka pendek, dan jangka panjang. Sehingga kami mengadakan rapat yang melibatkan semua pegawai dinas, LSM dari pihak swasta, utusan dari perusahaan-perusahaan yang ada dan para kepala desa di kabupaten mojokerto untuk menyusun program-program pengelolaan sampah pada dinas, baik rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.”
(Wawancara tanggal 12 Mei 2010 pukul 08.13 WIB di kantornya)

Pada tahap ini sudah dibicarakan secara detail dan lugas aspek-aspek peningkatan kebersihan yang ingin dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, kapan dan dimana dilakukan serta berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan tujuan untuk memudahkan dinas dalam melaksanakan dan memperoleh dukungan dari pemerintah maupun dari pihak swasta dan masyarakat, baik secara moral, maupun finansial guna melaksanakan rencana peningkatan kebersihan Kabupaten Mojokerto.

3. Langkah-Langkah/Program Kerja Dinas

Dalam upaya mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan secara optimal semua kekuatan yang dimiliki dinas, termasuk potensi eksternal yang mendukung, serta bagaimana mengatasi kelemahan/hambatan yang ada maka disusunlah program kerja.

Terdapat banyak program dinas baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang akan direalisasikan sehingga perlu disosialisasikan untuk mendapat persetujuan dan dukungan sepenuhnya dari pihak swasta dan

masyarakat karena menyangkut perkembangan dan peningkatan kebersihan kotanya.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Kepala Dinas, bahwa:

”Sejauh ini yang kami lakukan mengenai peningkatan kebersihan Kabupaten Mojokerto ini yaitu melakukan langkah-langkah secara bertahap dengan tujuan agar pelaksanaan pengelolaan sampah tersebut berjalan dengan baik dan lancar serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat khususnya masalah sampah”

(Wawancara tanggal 11 Mei 2010 pukul 08.15 WIB di kantornya)

Dalam melaksanakan pengelolaan sampah ini yang sudah disusun dalam program kerja, Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto dikantornya melakukan langkah-langkah secara bertahap yang bertujuan agar pelaksanaan pengelolaan sampah ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dalam pelaksanaan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

a. Langkah awal

1. Melakukan hal-hal yang bersifat relevan dan potensial untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan kota.
2. Berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan memberi pembekalan terhadap pegawai dinas tentang gambaran umum pelaksanaan pengelolaan sampah yang baik.
3. Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh dinas.
4. Peningkatan kemampuan pegawai dinas dalam melaksanakan kerjanya di lapangan.

b. Langkah pembenahan

1. Menentukan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah nantinya.

2. Menetapkan pegawai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga memudahkan pengaturan dan pengontrolan terhadap perkembangan kinerja pegawai selama di dinas

c. Langkah pembaharuan

1. Menyiapkan fasilitas yang diperlukan oleh dinas dalam pelaksanaan pengelolaan sampah
2. Menyelenggarakan diklat bagi pegawai untuk pembekalan dan peningkatan keterampilan dalam melaksanakan kerjanya

d. Langkah pembangunan

1. Memperbaiki TPS dan TPA yang ada yang telah usang agar masih bisa untuk dipergunakan
2. Membangun dan menyediakan tempat sampah pada tempat umum untuk membiasakan masyarakat membuang sampah pada tempatnya
3. Melengkapi dan perawatan sarana prasarana yang ada pada dinas untuk melakukan pengelolaan sampah.
4. Memberikan penghargaan (reward) kepada pegawai yang trampil dan berprestasi dalam meningkatkan kebersihan kota.

Dari penjelasan beberapa langkah yang ditempuh Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto merupakan program jangka pendek, jangka menengah, dan program jangka panjang. Untuk langkah awal dan langkah pembenahan merupakan program jangka pendek, untuk langkah pembaharuan merupakan program jangka menengah, sedangkan untuk langkah pembangunan merupakan program jangka panjang.

b. Kegiatan Pengorganisasian / Kelembagaan

Motor penggerak pengelolaan persampahan adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan seluruh aspek manajemen untuk menghasilkan kualitas pelayanan persampahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk

itu diperlukan suatu kebijakan yang mendukung perkuatan kapasitas kelembagaan pengelola persampahan. Penguatan kelembagaan tersebut ditinjau dari bentuk institusi yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan tanggung jawabnya, memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta didukung oleh tenaga yang terdidik dibidang manajemen persampahan.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Dan Tata Ruang yang mencakup pelayanan sampah dengan jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto saat ini kurang lebih sekitar 1 juta jiwa dengan jumlah timbunan sampah yang harus dikelola oleh Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang adalah sekitar 190 m³ setiap harinya.

Upaya pemerintah untuk pengelolaan sampah yang lebih baik serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat adalah hal utama yang harus dibangun. Pembuatan kebijakan mengenai pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat di Kabupaten Mojokerto sebenarnya telah ada, tetapi dalam prakteknya masih belum berjalan dengan baik. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Mursadi, salah satu pegawai di PEMDA Bagian Hukum Kabupaten Mojokerto :

“Peraturan yang menjadi dasar hukum untuk pengelolaan sampah itu sudah ada, seperti pembayaran retribusi sampah, sanksi, serta peraturan-peraturan lain. Pemerintah juga membuat kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah dengan meningkatkan peran serta masyarakat adalah mengenai penyediaan tempat sampah di tempat umum. Pemerintah menyediakan wadah yang ditempatkan ditempat-tempat umum, dengan sistem terpisah antara sampah organik dan sampah non-organik. Hal tersebut merupakan upaya pembelajaran kepada masyarakat untuk mengubah budaya membuang sampah dan memisahkan sampah. Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam mengelola sampah mulai dari sumbernya.
(Wawancara tanggal 16 Mei 2010 pukul 09.00 WIB di kantornya).

Pelayanan sampah yang baik juga harus didukung oleh personil pegawai yang memiliki kompetensi sehingga tidak bisa dipungkiri bahwasannya penting juga untuk melihat jumlah personil/pegawai dinas yang melaksanakan pengelolaan sampah. Adapun data jumlah keseluruhan pegawai dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 5

Uraian Jumlah Pegawai Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Mojokerto

No.	Uraian Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Dinas	1 orang
2.	Sekretariat	1 orang
3.	a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	10 orang
4.	b. Sub Bagian Keuangan	10 orang
5.	c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program	10 orang
6.	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi	1 orang
7.	a. Seksi Tata Bangunan	1 orang
8.	b. Seksi Jaks Konstruksi	1 orang
9.	c. Seksi Perencanaan Teknis	1 orang
10.	d. Staf Pembantu	22 orang
11.	Kepala Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan	1 orang
12.	a. Seksi Tata Perumahan	1 orang
13.	b. Seksi Penyehatan Lingkungan	1 orang
14.	c. Seksi Tata Ruang	1 orang
15.	d. Staf Pembantu	22 orang
16.	Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan	1 orang
17.	a. Seksi Pengolahan Persampahan	1 orang
18.	b. Seksi Pertamanan	1 orang
19.	c. Seksi air Kotor	1 orang
20.	d. Staf Pembantu	27 orang
21.	Kepala Bidang Angkutan dan Peralatan	1 orang
22.	a. Seksi Angkutan	1 orang
23.	b. Seksi Peralatan	1 orang
24.	c. Seksi Perbenkolan	1 orang
25.	d. Staf Pembantu	22 orang
	Jumlah Pegawai Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	141 orang

Sumber: Renstra Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto 2009

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah dalam memberikan pelayanan di Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang di jelaskan Bpk. Zaenal selaku Kepala Dinas :

“Sumberdaya manusia yang kurang memahami untuk mengikutsertakan masyarakat dalam menerapkan 3R. Hal ini karena pemerintah belum melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah secara swadaya untuk masyarakat yang belum mengetahui pengelolaan sampah secara swadaya. Lalu masalah sedikitnya intensitas penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya untuk memberikan pengarahannya masyarakat dalam mengelola sampah. Setiap tahun penyuluhan dilakukan 18 kali dengan jumlah kelurahan sebanyak 18 sehingga setahun sekali satu kelurahan mendapatkan penyuluhan dari Dinas PU Cipta Karya.”

(Wawancara tanggal 17 Mei 2010 pukul 11.00 WIB di ruangnya)

Hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah belum mampu mengelola sampah seluruh Kabupaten Mojokerto. Peranan swasta agar berpartisipasi menjaga lingkungan dari sampah sangatlah penting untuk itu perlu dilakukan pengembangan kemitraan dengan swasta melalui kontrak manajemen, sistem lelang dan lain-lain dalam pelaksanaannya. Untuk melaksanakan pengurangan sampah di sumber dan meningkatkan pola-pola penanganan sampah berbasis masyarakat, diperlukan perubahan pemahaman bahwa masyarakat bukan lagi hanya sebagai obyek tetapi lebih sebagai mitra yang mengandung makna kesetaraan. Tanpa ada peran aktif masyarakat akan sangat sulit mewujudkan kondisi kebersihan yang memadai. Disamping masyarakat, pihak swasta/dunia usaha juga memiliki potensi yang besar untuk dapat berperan serta menyediakan pelayanan publik ini. Sejalan dengan hal tersebut Bapak Totok Selaku Kasi Pengelolaan Persampahan mengungkapkan :

“Swasta jangan lagi dimanfaatkan bagi kepentingan lain, tetapi perlu dilihat sebagai mitra untuk bersama mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kehadirannya sangat diperlukan”

(Wawancara tanggal 18 Mei 2010 pukul 10.00 WIB di ruangnya)

Keluarnya UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2008, menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban setiap orang mempunyai kewajiban mengelola sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, wajib mengurangi dan menangani dengan cara yang berwawasan lingkungan.

c. Kegiatan Pelaksanaan

Sistem pengolahan sampah di Kabupaten Mojokerto dilakukan meliputi proses pengumpulan (*Collection*), pengangkutan (*Haulage*), pengolahan akhir (*Treatment*), dengan demikian teknik operasional persampahan ini akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengumpulan hingga pembuangan. Ditinjau dari sumber timbunannya, sampah yang ada dari kawasan perencanaan saat ini berasal dari sampah rumah tangga, hasil kegiatan pertanian, sampak perkantoran/fasilitas umum dan sampah perdagangan. Rencana pengumpulan dan pengangkutan sampah di kawasan perencanaan dilakukan dengan menggunakan dua pola pengumpulan, yaitu pola komunal dan pola individual.

Penanganan sampah di Kabupaten Mojokerto terpusat di 2 lokasi, yakni Kecamatan Mojosari dan Kecamatan Ngoro, dimana keduanya telah dilengkapi sarana TPA dengan metode Penanganan Control Landlife, masing-masing dengan luasan 1,1 Ha (Desa Belahan Tengah Kecamatan Mojosari) dan 3.7 Ha (Terletak di Ngoro Industri Persada Kecamatan Ngoro).

Adapun penanganan persampahan di tingkat masyarakat dilakukan sendiri oleh masyarakat sendiri. Sampah dikumpulkan di 10 (Sepuluh) TPS (Tempat Pembuangan Sementara) melalui manajemen yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Kemudian sampah yang telah terkumpul tersebut di angkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dengan menggunakan 4 buah truk. Untuk pekerjaan parataan dan pemadatan didatangkan Bolldozer dari Dinas tersebut

Penanganan sampah di Kabupaten Mojokerto tersebut seperti yang di ungkapkan oleh Bpk. Zaenal Kepala Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kab. Mojokerto bahwa:

“Metode pengelolaan sampah yaitu dari rumah tangga berupa bak-bak penampung sampah kemudian di ambil petugas menggunakan mobil dan di tempatkan sementara di TPS, kemudian truk dinas PU mengambil sampah dari TPS kemudian langsung di buang menuju TPA, demikian juga dengan sampah dari penyapuan yang dilakukan oleh pasukan kuning. Di TPA sendiri telah ada pemulung yang memilih sampah, Dinas juga mengelola sampah menjadi pupuk kompos, kemudian sampah yang tidak berguna diratakan menggunakan bulldozer. Sementara ini penanganan sampah masih di lakukan di daerah kota saja mas, yang di daerah pelosok masih belum terlaksana”.
(Wawancara tanggal 18 Mei 2010 pukul 10.45 WIB di ruangnya)

Sedangkan kondisi yang di inginkan dan proyeksi ke depan dalam pengelolaan sampah oleh Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang adalah adanya penyapuan jalan, pengangkutan sampah, pembersihan saluran air, rumput/sampah disekitar TPS, Transfer Depo TPA serta peningkatan dan pengaturan sarana dan prasarana kebersihan, persampahan, dan penerangan jalan umum di Kabupaten Mojokerto yang diharapkan.

Prediksi kebutuhan sarana persampahan didasarkan pada pelayanan jumlah penduduk yang dikaitkan dengan perkiraan jumlah timbunan sampah baik sampah domestik ataupun sampah non domestik baik dari kegiatan perdagangan maupun dari kegiatan lainnya. Sarana persampahan yang baik sangat menunjang pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto dengan adanya sarana persampahan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses penanggulangan sampah mengingat sampah yang dihasilkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan Bpk. Totok Kasi Pengelolaan Persampahan bahwa:

“Pengadaan maupun perawatan sarana persampahan menjadi hal utama dalam setiap perencanaan program dari Dinas. Mengingat pentingnya kegunaan dari sarana seperti mobil, gerobak sampah, dll. Perhatian untuk pengadaan serta perawatannya itu sangat kami perhatikan”.
(Wawancara tanggal 23Mei 2010 pukul 08.30 WIB di ruangnya)

Proses pelaksanaan pengelolaan sampah diatas harus didukung dengan adanya dukungan dana yang memadai agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Namun, pada kenyataannya perhatian terhadap pengelolaan persampahan masih belum memadai baik dari pihak kepala daerah maupun DPRD. Secara umum alokasi pembiayaan untuk sektor persampahan masih dibawah 5% dari total anggaran APBD, rendahnya biaya tersebut pada umumnya karena pengelolaan persampahan masih belum menjadi prioritas dan menggunakan pola penanganan sampah yang ala kadarnya tanpa memperhitungkan faktor keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Demikian juga dengan rendahnya dana penarikan retribusi (secara nasional hanya mencapai 22%), sehingga biaya pengelolaan sampah masih menjadi beban APBD.

Sistem pembiayaan pengelolaan persampahan meliputi:

1. Sumber dana yang digunakan untuk pengelolaan persampahan kota,
2. Besarnya dana yang diterima serta besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengelolaan persampahan dan
3. Cara pembayaran iuran/retribusi kebersihan.

Sumber dana pengelolaan persampahan kota berasal dari:

1. Pembayaran iuran layanan kebersihan,
2. Retribusi kebersihan,
3. Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

Cara pembayaran retribusi adalah:

1. membayar bersama dengan pembayaran iuran listrik
2. membayar di payment point
3. membayar langsung kepada petugas kebersihan
4. membayar melalui ketua RT/RW.

Meskipun peraturan untuk penyelenggaraan retribusi sampah di Kabupaten Mojokerto belum diperbaharui, optimalisasi pembayaran retribusi sampah terus digalakkan. Hasil dari retribusi sampah nantinya akan menjadi pemasukan PAD bagi Kabupaten Mojokerto dan akhirnya menjadi anggaran dalam biaya operasional Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Totok selaku Kasi Pengelolaan Persampahan bahwa:

“Pendanaan pemerintah untuk pengelolaan sampah masih kurang mas, pendanaan dari APBD tiap tahunnya hanya cukup untuk biaya perawatan mobil dan oprasional di TPA. Pada umumnya memang masalah persampahan belum mendapatkan perhatian yang cukup, padahal hal tersebut akan berdampak pada buruknya kualitas penanganan sampah.”

(Wawancara Tanggal 18 Mei 2010 pukul 11.00 di ruangnya)

Rendahnya biaya pengelolaan persampahan pada umumnya karena masalah persampahan belum mendapatkan perhatian yang cukup selalu akan berdampak pada buruknya kualitas penanganan sampah termasuk pencemaran lingkungan di TPA. Biaya operasional yang dilakukan masih bertumpu kepada pelayanan pengangkutan sampah atau membersihkan sampah di TPS. Pemerintah belum

mengembangkan kekuatan masyarakat dalam mengelola sampah. Permasalahan anggaran selalu menjadi faktor utama tidak dapat dilakukannya kegiatan menggerakkan masyarakat karena semua biaya pengelolaan sampah diperuntukkan perawatan untuk kendaraan dan mesin insenerator juga biaya operasional pengangkutan sampah seperti upah tenaga harian lepas dan biaya bensin kendaraan pengangkutan sampah.

Di dalam pelaksanaan pengelolaan sampah juga penting untuk diperhatikan adanya kegiatan pengawasan didalamnya. Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan hanya dilakukan dalam tahap pelaksanaan. Pengawasan merupakan unsur yang pokok bagi setiap manajemen, termasuk unsur manajemen pengelolaan sampah.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zaenal sebagai Kepala Dinas Sebagai berikut:

“Pengawasan dalam pengelolaan sampah pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto dilakukan dari tahap pengumpulan sampah yang dilakukan oleh pasukan kuning, pengawasan pasukan kuning dilakukan oleh kepala pasukan kuning dan kepala ini diawasi oleh kepala wilayah masing-masing di Kabupaten Mojokerto. Pada pengawasan tahap setelah pengumpulan sampah seperti pengangkutan dan pembuangan akhir di TPA, pengawasan dilakukan oleh Seksi Pengelolaan Persampahan dan puncak pengawasan seluruh sistem pengelolaan sampah adalah Kepala Dinas.”
(Wawancara tanggal 23 Mei 2010 pukul 08.40 WIB di kantornya)

Ditambahkan oleh Bapak Totok sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan sebagai berikut:

“Terdapat tahapan-tahapan pengawasan dalam pengelolaan sampah, mulai dari tingkat bawah yaitu pasukan kuning yang diawasi oleh mandor. Tahapan-tahapan pengelolaan sampah mulai dari kebersihan jalan, taman, dan makam, pengangkutan dan pengelolaan TPS dan TPA diawasi oleh kepala seksi masing-masing dan mereka memberikan laporannya kepada kepala dinas”
(Wawancara tanggal 24 Mei 2010 pukul 08.30 WIB di kantornya)

Untuk keseluruhan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Dinas mulai dari kinerja pada sekretariat, bidang tata bangunan dan jasa konstruksi, bidang perumahan dan penyehatan lingkungan, bidang kebersihan dan pertamanan, dan bidang angkutan dan peralatan. Jika terdapat pelanggaran dalam melaksanakan kegiatannya akan dikenakan teguran untuk yang pertama kalinya, dan jika terus berlanjut akan mendapatkan sanksi berupa hukuman atau penundaan kenaikan pangkat pada masing-masing pegawai.

Tindakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pelayanan persampahan yang sudah maksimal, tidak membuat perubahan yang signifikan untuk merubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Pelaksanaan pelayanan yang dilakukan masih sebatas membersihkan sehingga hal tersebut tidak mendapatkan perubahan perilaku masyarakat untuk membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang sehingga tidak mungkin menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengatasi masalah sampah di Kabupaten Mojokerto.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Mojokerto

a. Faktor Internal

Faktor internal terdiri atas dua faktor strategis organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto, dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

1. Faktor Kekuatan Organisasi :

a. Tersedianya aparatur pemerintah yang mempunyai SDM berkualitas.

Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam suatu organisasi, karena sumber daya manusia merupakan unsur penggerak segala kegiatan yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zaenal sebagai Kepala dinas sebagai berikut:

”Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Kabupaten Mojokerto, dalam upayanya memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat dan juga mewujudkan lingkungan hidup yang bersih tergantung pada jumlah dan tingkat kualitas personilnya. Keberadaan petugas operasional lapangan memegang peranan yang sangat besar, karena baik secara langsung maupun tidak langsung merekalah yang turun tangan mengerjakan pembersihan sampah yang diproduksi setiap hari oleh warga masyarakat.”
(Wawancara tanggal 25 Mei 2010 pukul 09.10 WIB di kantornya).

Ditambahkan oleh Bapak Totok selaku Kepala Seksi Pengolahan Persampahan:

”Upaya lain yang dilakukan oleh dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan mengikutkan pegawainnya dalam program diklat (pendidikan dan pelatihan). Alasan diikutkannya pegawai dalam program diklat tersebut adalah untuk meningkatkan keterampilan teknis para pegawai. Diklat mempunyai tujuan untuk memelihara, meningkatkan kecakapan pegawai lama maupun pegawai baru.”
(Wawancara tanggal 26 Mei 2010 pukul 09.00 WIB di kantornya)

b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang tugas operasional.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pelaksanaan pengelolaan sampah. Untuk tetap eksistensi dalam menjaga kebersihan kota, maka kebutuhan sarana dan prasarana harus lebih ditingkatkan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Totok selaku Kepala seksi Pengolahan Persampahan sebagai berikut:

”Sarana dan prasarana pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang masih perlu ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu keharusan bagi dinas untuk memberikan sarana dan prasarana penunjang yang lebih memadai agar kinerja para pegawai dalam pengelolaan sampah lebih efektif dan efisien demi terciptanya kebersihan dan keindahan kotanya.”
(Wawancara tanggal 2 Mei 2010 pukul 09.15 WIB di kantornya).

c. Dukungan dana dari APBD.

Proses pengelolaan seperti pembuangan sampah memerlukan biaya yang sangat besar terutama dalam pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Terbatasnya dana operasional pengelolaan sampah mengakibatkan program kerja tidak berjalan dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zaenal selaku Kepala dinas sebagai berikut:

“Anggaran Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahunnya rata-rata meningkat dan retribusi yang ditarik setiap bulannya dari masyarakat.”
(Wawancara tanggal 25 Mei 2010 pukul 09.50 WIB di kantornya).

Ditambahkan oleh Bapak Totok selaku Kepala Seksi Pengolahan Persampahan yaitu:

“Ketersediaan dana yang cukup merupakan faktor yang menentukan tingkat kelancaran pelaksanaan suatu program dalam pengelolaan sampah. Apabial Pemd melalui dinas telah mampu untuk mengoptimalkan dana kebersihan, maka untuk menciptakan kota yang bersih bukan merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan.”
(Wawancara tanggal 26 Mei 2010 pukul 09.30 WIB di kantornya).

2. Faktor Kelemahan Organisasi:

a. Terbatasnya anggaran operasional.

Faktor dana atau anggaran merupakan salah satu faktor yang tidak dapat terpisahkan dalam hal pelaksanaan pembangunan termasuk hal pengelolaan sampah. Namun tanpa adanya dukungan anggaran yang cukup, merupakan suatu hambatan untuk melaksanakan pengelolaan sampah ini. Oleh karena itu pemerintah menyiapkan dana operasional yang berasal dari APBD.

Diungkapkan oleh Bapak Zaenal selaku Kepala Dinas, sebagai berikut:

”Dalam urusan masalah kebersihan ini memang membutuhkan anggaran yang cukup besar seiring dengan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang demi kelancaran dalam pelaksanaannya sehingga pemerintah mencoba untuk mencari alternatif lain yaitu dengan memberlakukan retribusi kebersihan kepada warga setiap bulannya untuk menambahi anggaran yang tersedia.”
(Wawancara tanggal 25 Mei 2010 pukul 10.00 WIB di kantornya).

Pernyataan diatas sejalan dengan pernyataan bapak Totok selaku kepala Seksi Pengolahan Persampahan sebagai berikut:

”Terbatasnya anggaran operasional menyebabkan pemerintah melalui dinas memberlakukan cara lain yaitu dengan melakukan penarikan retribusi kebersihan. Namun, sejalan dengan penarikan retribusi kebersihan tersebut maka personil dinas harus lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.”

(Wawancara tanggal 26 Mei 2010 pukul 09.40 WIB di kantornya).

b. Terbatasnya sarana prasana operasional.

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang tidak dapat dilepaskan perannya dalam pemberian pelayanan pada masyarakat. Terbatasnya sarana dan prasarana merupakan suatu yang bisa menghambat kinerja dari para personil dinas yang sedang menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan pada publik.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Totok selaku Kepala seksi Pengolahan Persampahan berikut ini:

“Dalam memberikan pelayanannya, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang harus dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang ada karena apabila sarana dan prasarana tidak menunjang, maka kinerja dari para personil dinas tidak akan dapat maksimal. Hal ini tidak lain dikarenakan anggaran dari APBD yang diberikan tidak mencukupi. Oleh karena itu untuk memberikan sarana dan prasarana yang menunjang, pemerintah melalui dinas harus benar-benar mengefektifkan pungutan yang berasal dari retribusi kebersihan agar anggaran dalam pengelolaan sampah ini dapat mencukupi.”

(Wawancara tanggal 26 Mei 2010 pukul 09.50 WIB di kantornya).

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri atas dua faktor strategis dimana karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

1. Faktor Peluang Organisasi :

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pemilihan alternatif teknologi pengolahan sampah juga seharusnya mempertimbangkan kriteria penguatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Implementasi suatu jenis teknologi pengolahan sampah yang tepat diharapkan akan memperkuat peran serta masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan sampah. Hal ini disebabkan dalam suatu pembangunan masyarakat harus dilibatkan karena merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Ditegaskan kembali oleh Bapak Totok selaku Kepala Seksi Pengolahan Persampahan sebagai berikut:

“Pemerintah melalui Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang berusaha mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam proses peningkatan kebersihan melalui media sosialisasi dan pemberitahuan melalui spanduk-spanduk yang berisi himbauan tentang betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan. Hal ini sangat penting dilakukan agar terjadi koordinasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sampah.”
(Wawancara tanggal 26 Mei 2010 pukul 10.15 WIB di kantornya).

Pernyataan diatas juga sejalan dengan pernyataan seorang warga Desa Belahan Tengah yaitu Bapak Arifin yang menyatakan:

“Memang sudah seharusnya pemerintah untuk sering-sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan dari permasalahan sampah. Selaku warga yang baik sudah semestinya untuk membudayakan budaya bersih yang dimulai dari diri sendiri yaitu dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat.”
(Wawancara tanggal 22 Mei 2010 pukul 09.00 WIB di Pasar Mojosari).

b. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan keindahan.

Peningkatan kesadaran masyarakat sangatlah penting disini karena menjaga kebersihan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas yang bertanggung jawab untuk mengurus masalah kebersihan kota, namun seluruh warga masyarakatnya juga haru ikut berpartisipasi di dalamnya. Apabila lingkungan bersih, maka keindahan dan kenyamanan hidup akan terasa, namun sebaliknya apabila peran serta dari masyarakat kurang dalam menjaga kebersihan, maka dampak buruk yang ditimbulkanpun akan terasa seperti apabila di musim hujan

akan bisa mengakibatkan banjir dan membawa wabah penyakit. Oleh karenanya penting dalam pengelolaan sampah ini untuk menekankan budaya bersih pada masyarakat.

Sejalan dengan pernyataan diatas seperti yang diungkapkan oleh Bapak Totok selaku Kepala Seksi Pengolahan Persampahan yaitu:

“Permasalahan sampah bukan hal yang baru lagi untuk dijumpai. Telah banyak dampak yang diakibatkan karena tidak tertanganinya dengan baik permasalahan ini. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh masyarakat agar mau ikut berperan serta dalam menjaga kebersihan kotanya dimulai dari yang paling dasar yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungannya. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai aktor utama dalam peningkatan kebersihan ini akan mengalami kesulitan apabila kesadaran dari masyarakat itu sendiri masih kurang, oleh karenanya perlu adanya timbal balik yang saling menguntungkan antara dinas dengan masyarakat.”

(Wawancara tanggal 26 Mei 2010 pukul 10.30 WIB di kantornya).

Hal senada juga diungkapkan oleh warga Desa Belahan Tengah Bapak Dayat dan Bapak Suwadi sebagai berikut:

“Memang kalau masalah sampah ini hanya dilakukan oleh dinas saja pasti akan mengalami kesulita karena seperti yang kita ketahui bahwasannya kesadaran masyarakat sangat kurang akan menjaga kebersihan lingkungannya apalagi kebiasaan untuk membuang sampah disembarang tempat sudah menjadi budaya karena alasan malas atau pilih cepatnya saja ketimbang mencari tempat sampah dulu. Sebenarnya sebagai warga kami juga telah mengadakan kegiatan kerja bakti tiap minggu, akan tetapi hal tersebut masih dirasa kurang karena ketika kami lewat di desa-desa lain ternyata masih ada yang belum melaksanakan kegiatan seperti ini. Jadi saran untuk pemerintah agar selain melakukan sosialisasi dan pemasangan spanduk himbauan, juga melakukan pengecekan kedesa-desa di Kabupaten Mojokerto.

(Wawancara tanggal 14 Mei 2010 pukul 09.00 WIB di rumahnya).

2. Faktor Tantangan Organisasi :

a. Luasnya wilayah pelayanan.

Luas suatu daerah menjadi suatu tantangan tersendiri oleh suatu dinas pemerintahan yang berada di dalamnya untuk memberikan pelayanannya. Dinas pemerintahan setempat harus bisa mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimilikinya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zaenal selaku Kepala Dinas sebagai berikut:

“Kabupaten Mojokerto adalah salah satu daerah yang memiliki wilayah bisa dibidang cukup luas. Oleh karena itu dinas-dinas yang ada pada Pemerintahan Kabupaten Mojokerto harus bisa mengoptimalkan pelayanannya, yaitu salah satunya adalah Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang ini yang menaungi masalah kebersihan kota berusaha untuk tetap menjaga kebersihan kota dengan memanfaatkan kemampuan personilnya.

(Wawancara tanggal 25 Mei 2010 pukul 10.20 WIB di kantornya).

b. Kurangnya kualitas SDM pelaksana di lapangan.

Kurangnya kualitas SDM pelaksana di lapangan merupakan salah satu tantangan lain yang harus dihadapi karena faktor kemampuan yang dimiliki para personil merupakan indikator penting dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Apabila personil atau SDM yang ada memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, maka semua tugas yang telah dibebankan padanya akan dapat terkoordinir dengan baik dan tepat sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zaenal selaku Kepala Dinas yaitu sebagai berikut:

“Kualitas SDM atau personil dinas pelaksana di lapangan perlu juga untuk mendapat perhatian khusus dari dinas. Hal ini dikarenakan apabila para personil dinas yang berada di lapangan tanpa memiliki kemampuan yang mumpuni, maka banyak tugas yang akan terbengkalai. Oleh sebab itu, perlu oleh dinas untuk melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) oleh dinas agar kemampuan para personil pelaksana di lapangan bisa meningkat sehingga dalam bekerja mereka selalu memperhatikan prinsip efektifitas.”

(Wawancara tanggal 25 Mei 2010 pukul 10.30 WIB di kantornya).

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Totok selaku Kepala Seksi Pengolahan Persampahan sebagai berikut:

“Kemampuan para personil dinas dalam bekerja menentukan tingkat profesionalitas mereka dalam memberikan pelayanan. Banyak personil dinas disini yang memiliki kemampuan dibawah rata-rata dilihat dari pendidikan mereka. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan (diklat) para personil dinas mutlak harus dilakukan agar kinerja mereka kedepan terus meningkat sehingga tujuan awal dari dinas ini untuk menciptakan kebersihan dan kenyamanan kota dapat terwujud.”

(Wawancara tanggal 26 Mei 2010 pukul 10.50 WIB di kantornya).

B. Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, peneliti berusaha untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang ada. Peneliti di sini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana metode ditujukan untuk menggambarkan pengelolaan sampah secara terpadu di Kabupaten Mojokerto berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut ini disajikan secara berturut-turut analisis dan interpretasi data-data yang dimaksud.

1. Pengelolaan Sampah Yang Dilakukan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto

a. Kegiatan Perencanaan

Diungkapkan oleh Hasibuan (2005:40) bahwa perencanaan adalah proses menentukan sasaran, alat, tuntutan-tuntutan, taksiran, pos-pos tujuan, pedoman, dan kesepakatan (*commitment*) yang menghasilkan program-program kegiatan yang terus berkembang. Perencanaan juga meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biayanya. Proses perencanaan dilaksanakan secara kolaboratif atau kerjasama, artinya dengan mengikut sertakan personel pegawai dinas yang bersangkutan dalam semua tahap perencanaan. Pengikutsertaan ini akan menimbulkan perasaan saling ikut memiliki (*sense of belonging*) yang dapat memberikan dorongan pada kepala dinas, pegawai dan personel dinas yang lain untuk berusaha agar rencana tersebut berhasil.

Langkah-langkah perencanaan tersebut secara sistematis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan analisis sasaran, hasilnya berupa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto yaitu keadaan sasaran sekarang dengan yang diharapkan di masa mendatang (*ideal*). Besar kecilnya sasaran tersebut memberitahukan besar kecilnya tantangan (*loncatan*). Selain itu juga diharapkan kerjasama dari pihak swasta dan masyarakat untuk bekerja sama dengan dinas untuk mau memelihara kebersihan lingkungannya guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2. Merumuskan sasaran, hasilnya adalah pengamatan atas situasi di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto target jangka pendek yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan dinas. Mengenai sasaran dinas yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto, peneliti menemukan adanya pengklasifikasian berdasarkan beberapa aspek yakni aspek peningkatan manajemen, pembinaan pegawai, pengembangan fasilitas/sarana-prasarana, dan aspek pengembangan sumber tenaga pelaksana. Sasaran dinas di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto sangat mungkin berubah mengingat adanya tuntutan pembangunan secara terus menerus.
3. Menyusun program kerja yaitu yang memuat sejumlah program aktivitas yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan sejumlah program aktivitas yang telah ditetapkan dan harus memperhitungkan kunci pokok dari strategi perencanaan dari tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Perencanaan program Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto sebagai proses peningkatan kebersihan kota mencakup langkah awal dan langkah pembenahan merupakan program jangka pendek yang menunjukkan kesiagaan kepala dinas dalam melakukan pengelolaan sampah yang baik utamanya dengan memberikan pembekalan kepada tenaga pelaksana di lapangan tentang tata cara peningkatan kebersihan kota melalui pengelolaan sampah yang baik dan sebagai langkah untuk membenahi segala kekurangan yang dibutuhkan dalam penerapan pengelolaan sampah dengan melakukan restrukturisasi pola yang sudah tidak relevan. Langkah pembaharuan merupakan program jangka menengah yaitu upaya membentuk setiap program yang belum ada yang sangat dibutuhkan untuk menunjang penerapan pengelolaan sampah terpadu seperti menyiapkan fasilitas yang diperlukan oleh dinas dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dan menyelenggarakan diklat bagi pegawai untuk pembekalan dan peningkatan keterampilan dalam melaksanakan kerjanya. Langkah pembangunan merupakan program jangka panjang yaitu sebagai upaya pembangunan fisik dinas akibat reformasi manajemen administrasi publik.

Hal tersebut harus terus-menerus dilakukan sehingga proses peningkatan kebersihan kota yang berkelanjutan di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto dapat tercapai sesuai dengan program yang telah direncanakan. Perencanaan pada institusi pelayanan yang diberikan dinas sudah mampu menyesuaikan diri terhadap kebutuhan, dapat dipertanggungjawabkan, dan menjadi penjelas dari tahap-tahap yang dikehendaki dengan melibatkan sumberdaya dalam pembuatan keputusan.

b. Kegiatan Pengorganisasian / Kelembagaan

Penanganan sampah memang bukanlah hal yang mudah, selain melibatkan banyak pihak, memerlukan teknologi, memerlukan dana yang cukup besar, dan partisipasi dari berbagai pihak baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kelembagaan merupakan organisasi dan aturan main (*rules of the game*). Kelembagaan sebagai suatu organisasi menggambarkan koordinasi yang didasarkan atas mekanisme administratif sehingga mengarah pada pengertian lembaga yang bersifat formal seperti departemen dalam pemerintahan, perusahaan, koperasi, bank dan sebagainya.

Menurut Anwar (1995), apabila dikaji lebih cermat berdasarkan konsep kelembagaan, ternyata organisasi merupakan bagian (unit) pengambilan keputusan yang didalamnya diatur oleh sistem kelembagaan atau aturan main. Aturan main disini mencakup keserasian yang lebih luas dalam bentuk konstitusi suatu negara sampai pada kesepakatan diantara dua pihak (individu) yang menyepakati aturan bersama mengenai pembagian manfaat dan beban yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan defenisi dan terminologi yang berlaku di masyarakat, maka lembaga adalah kombinasi dari : Kebijakan dan tujuan, Hukum, aturan main, dan peraturan, Organisasi, Rencana operasi dan prosedur, Mekanisme insentif, Mekanisme pertanggungjawaban, Norma, tradisi, praktek, dan kebiasaan.

Kelembagaan yang baik merupakan kunci dari keberhasilan pengelolaan negara, pembangunan, pasar, perdagangan atau bisnis. Demikian pula halnya

dengan kelembagaan penanganan persampahan. Kelembagaan penanganan sampah kota tidak hanya terdiri dari organisasi yaitu hubungan keterkaitan berbagai pihak (*stakeholder*) tetapi dapat juga berupa aturan dan kebijakan yang akan berpengaruh dalam mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun teknologi.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kota berkembang dan untuk mengelola sampah ditangani Unit di bawah Dinas PU yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang memadai untuk mengolah sampah. Operasional menyangkut tingkat pelayanan (100 persen daerah komersial dan pasar dan 50 persen daerah pemukiman yang secara bertahap akan ditingkatkan menjadi 100 persen) dan daerah pelayanan (pemukiman, komersial, fasilitas umum, penyapuan jalan, pembersihan saluran).

Secara umum pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto sudah cukup baik. Selain berfungsi sebagai pengelola sampah, dinas tersebut juga berperan sebagai pengawas, dan pembina pengelola persampahan. Sebagai pengawas, Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto selain melaksanakan evaluasi hasil pemantauan kinerja juga memberikan sanksi kepada unit pelaksana di lapangan. Agar kinerja para unit pelaksana meningkat, maka peranan Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto juga melakukan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan umpan balik atas pelayanan pengelolaan persampahan.

Walaupun wewenang Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto hampir mencakup seluruh alur kegiatan pengelolaan sampah, akan tetapi pada beberapa permukiman di Mojokerto, pengelolaan sampahnya dilakukan oleh masyarakat maupun pihak swasta. Masyarakat lebih banyak terlibat pada aktivitas di tempat pengumpulan sampah, sedangkan pihak swasta umumnya pada aktivitas pengangkutan dan proses-proses pemanfaatannya.

Kurangnya pengetahuan dalam menyusun rancang tindak penanganan sampah berdasarkan kebutuhan alat, jarak tepuh dari TPS ke TPA, serta tumpang tindihnya fungsi-fungsi dari Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten

Mojokerto, menyebabkan pengelolaan persampahan menjadi tidak efektif. Hal tersebut mengingat bahwa Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto yang bertindak sebagai pihak pengawas, seharusnya mengukur kinerja keberhasilan pengelolaan sampah, sebagai dasar penyempurnaan rancang tindak penangannya, dan bukan sebagai pelaksana penanganan persampahan.

c. Kegiatan Pelaksanaan

Pelaksanaan berarti merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Menurut Hasibuan (2005:41), pelaksanaan akan berjalan dengan baik apabila seluruh pelaksana kegiatan dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat dan efektif. Namun, faktor dari gaya kepemimpinan seorang pemimpin juga mempengaruhi para bawahan untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Teknis operasional pelaksanaan pengelolaan sampah meliputi kegiatan pewadahan/ pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir berikut peralatan serta teknologi yang digunakan. Pewadahan dilakukan oleh sumber sampah, yaitu rumah tangga, toko, restoran, hotel, pedagang pasar, pengelola sekolah, dan sebagainya. Bentuk wadah yang digunakan ditentukan sendiri sesuai selera dan kemampuan pemiliknya, dapat berupa tong logam, bin plastik, kotak kayu, atau bak pasangan bata. Untuk memudahkannya lagi pada saat seperti sekarang ini terdapat wadah yang terdiri dari dua jenis sampah yaitu organik dan non-organik sehingga mempermudah pegawai dinas untuk memilah sampah nantinya. Setelah terkumpul di dalam wadah, sampah dapat diolah sendiri oleh pemiliknya, misalnya dijadikan kompos, atau menunggu untuk diambil petugas.

Pengumpulan sampah adalah mengambil sampah dari sumber untuk dikelola lebih lanjut. Pekerjaan pengumpulan sampah di daerah pemukiman umumnya dikelola dan dilakukan oleh organisasi masyarakat, misalnya RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga). Kegiatan ini dibiayai dari iuran yang dipungut dari masyarakat yang dilayani. Di daerah non pemukiman, termasuk penyapuan jalan, umumnya pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola persampahan kota,

misalnya pada daerah komersial, taman kota, pasar, dan sebagainya. Pengumpulan sampah juga dapat dilakukan oleh perusahaan swasta yang bekerja sesuai kontrak kerja. Setelah dikumpulkan di lokasi pemindahan (transfer depo) proses akhir dari pengelolaan sampah adalah pembuangan akhir ke TPA (Arianto dan Darwin, 2003).

Sedangkan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto ini dilakukan dari tahap pengumpulan sampah yang dilakukan oleh pasukan kuning, pengawasan pasukan kuning dilakukan oleh kepala pasukan kuning dan kepala ini diawasi oleh kepala wilayah masing-masing di Kabupaten Mojokerto. Pada pengawasan tahap setelah pengumpulan sampah seperti pengangkutan dan pembuangan akhir di TPA, pengawasan dilakukan oleh Kepala Bagian Seksi Pengelolaan Persampahan dan puncak pengawasan seluruh sistem pengelolaan sampah adalah Kepala Dinas itu sendiri.

Tugas kepala dinas dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto sangat besar. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuannya sebagai motor penggerak, penentu arah kebijakan dinas dan yang menetapkan bagaimana tujuan-tujuan dinas pada umumnya direalisasikan. Kepala dinas juga mempunyai kinerja kepemimpinan yang efektif. Sehingga kepemimpinan kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto bersifat demokratis karena keterbukaannya dan keinginannya memposisikan pekerjaan dari, oleh, dan untuk bersama. Tugas dan tanggungjawab dibagi menurut bidang masing-masing. Uraian tersebut sesuai dengan ciri kepemimpinan demokratis menurut Sudarwan (2008:213) antara lain:

1. Beban kerja organisasi menjadi tanggung jawab bersama personalia organisasi
2. Bawahan oleh pimpinan dianggap sebagai komponen pelaksana dan secara integral harus diberi tugas dan tanggung jawab
3. Disiplin tetapi tidak kaku dan memecahkan masalah secara bersama
4. Kepercayaan tinggi terhadap bawahan dengan tidak melepaskan tanggung jawab pengawasan
5. Komunikasi dengan bawahan bersifat terbuka dan dua arah.

Menurut penulis, adapun yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto yaitu peran dari swasta dan masyarakat. Hal ini dikarenakan tanpa adanya koordinasi yang baik antara dinas, pihak swasta dan masyarakat maka tujuan untuk menciptakan kota yang bersih tidak akan dapat tercapai. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip dari koordinasi, yaitu:

1. Prinsip Kontak Langsung

Prinsip ini menyatakan bahwa koordinasi harus dicapai melalui hubungan antar manusia baik hubungan secara horizontal maupun vertical. Dalam hubungan langsung tersebut dapat terjadi pertukaran gagasan, pendapat, harapan dan sebagainya: cara ini dianggap lebih sempurna dibandingkan dengan cara-cara lain. Semua pendapat bisa dikemukakan secara lebih detail sehingga memungkinkan untuk diperolehnya saling pengertian yang mendalam.

2. Prinsip Penekanan Pada Pentingnya Koordinasi

Kurang baiknya koordinasi yang dapat menimbulkan kesimpangsiuran di dalam organisasi. Selain itu, koordinasi yang baru diadakan kemudian juga dapat menghambat jalannya organisasi. Oleh karena itu koordinasi perlu dilakukan sejak membuat perencanaan sampai melaksanakan kebijakan. Jika suatu perencanaan sudah dilaksanakan, maka sulit untuk menarik / mencabutnya kembali. Bilamana pencabutan tersebut berhasil dilakukan, ada kemungkinan bahwa tindakan itu dapat menimbulkan berbagai masalah. Sebagai contoh, bagian keuangan secara mendadak mengadakan pengetatan kredit tanpa memberitahukan bagian penjualan. Tentu saja tindakan ini akan menimbulkan kesulitan baik pada bagian penjualan itu sendiri maupun pada bagian atau pihak lain diluar organisasi.

3. Hubungan Timbal Balik Di Antara Faktor-Faktor Yang Ada

Masing-masing individu yang bekerja bersama-sama dalam kondisi pekerjaan tertentu, akan saling memberikan pengaruh antara yang satu dengan yang lainnya. Kondisi, tujuan dan macam pekerjaan yang sama memungkinkan bagi mereka untuk mengadakan hubungan secara rutin, baik didalam bagian maupun antar bagian. Orang-orang yang berada pada penelitian pasar misalnya, akan

dipengaruhi oleh orang-orang dari bagian penjualan, keuangan dan bagian produksi dan mereka juga mempengaruhi orang-orang yang bekerja pada bagian-bagian tersebut. Kerjasama yang baik dapat dilakukan jika masing-masing individu saling memahami tugas-tugas mereka. Oleh karena itu mereka harus membuka kesempatan untuk saling mempertukarkan informasi.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Mojokerto

a. Faktor Internal

1. Faktor Kekuatan Organisasi :

a. Tersedianya aparatur pemerintah yang mempunyai SDM berkualitas.

Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam suatu organisasi, karena sumber daya manusia merupakan unsur penggerak segala kegiatan yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. SDM yang berkualitas akan menentukan keberhasilan dan kinerja dari suatu organisasi, namun hal tersebut tersebut dapat terealisasi dengan melihat kepada kemampuan pegawai yang ada.

Begitu pula halnya dengan dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Kabupaten Mojokerto, dalam upayanya memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat dan juga mewujudkan lingkungan hidup yang bersih tergantung pada jumlah dan tingkat kualitas personilnya. Keberadaan petugas operasional lapangan memegang peranan yang sangat besar, karena baik secara langsung maupun tidak langsung mereka turun tangan mengerjakan pembersihan sampah yang diproduksi setiap hari oleh warga masyarakat. Oleh karena itu terdapat Upaya yang dilakukan oleh dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparturnya adalah dengan mengikutkan pegawainnya dalam program diklat (pendidikan dan pelatihan). Alasan diikutkannya pegawai dalam program diklat tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis para pegawai. Diklat mempunyai tujuan untuk memelihara, meningkatkan kecakapan pegawai lama maupun pegawai baru. Jumlah sampah dari hari ke hari yang terus menumpuk menuntut para pegawai kebersihan untuk bisa memecahkan

permasalahan tersebut. Dengan adanya diklat ini diharapkan oleh dinas agar para pegawai lebih efektif dalam memberikan pelayanannya khususnya di bidang kebersihan.

Hal yang dilakukan oleh dinas diatas menurut penulis telah benar bahwasannya untuk membentuk sumber daya aparatur yang berkualitas perlu untuk diadakan pendidikan dan pelatihan (diklat). Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan serta mengembangkan keahlian yang dimiliki oleh para personil dinas sehingga dalam melakukan tugasnya tidak ada lagi kata "sulit" untuk dikerjakan justru kinerja dari para personil dinas dapat menjadi lebih maksimal lagi. Apabila hal ini telah terealisasi, maka masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang tugas operasional.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pelaksanaan pengelolaan sampah. Namun, kurangnya sarana dan prasarana penunjang merupakan salah satu penyebab rendahnya kinerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasibuan (2003: 30) yang menyatakan, berkaitan dengan peran teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagian besar departemen/institusi tampaknya akan memerlukan waktu untuk mempersiapkan diri.

Melihat pernyataan diatas, oleh karenanya untuk tetap eksistensi dalam menjaga kebersihan kota, maka kebutuhan sarana dan prasarana dalam Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang masih perlu ditingkatkan lagi. Sarana dan prasarana yang tersedia belum dapat dikatakan menunjang sepenuhnya pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan, karena sarana dan prasarana yang ada masih terkesan belum maksimal. Luas dari sebuah daerah juga menentukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Seperti halnya Kabupaten Mojokerto ini yang memiliki wilayah cukup luas dan penduduk yang juga tidak sedikit, oleh karenanya perlu adanya penambahan sarana dan prasarana oleh dinas untuk meningkatkan kinerjanya.

Ditambahkan oleh penulis bahwasannya peningkatan sarana dan prasarana dinas sangatlah penting mengingat bahwa permasalahan sampah merupakan masalah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi permasalahan ini sebisa mungkin oleh dinas harus segera ditangani. Sebisa mungkin dinas sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah ini untuk mengupayakan adanya penambahan sarana dan prasarana peninjau agar kinerja dari para personilnya dapat meningkat.

c. Dukungan dana dari APBD.

Proses pengelolaan seperti pembuangan sampah memerlukan biaya yang sangat besar terutama dalam pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Terbatasnya dana operasional pengelolaan sampah mengakibatkan program kerja tidak akan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan anggaran yang mencukupi untuk menunjang semua kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah disini melalui dinas yang bersangkutan.

Menurut penulis setelah melihat fakta dilapangan bahwasannya anggaran Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang asli berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahunnya rata-rata meningkat. Namun dana dari APBD ini masih dirasa kurang oleh dinas karena masih belum bisa untuk mencukupi sarana dan prasarana dinas yang lebih menunjang mengingat jumlah produksi sampah yang dihasilkan oleh warga dari hari ke hari terus meningkat. Dengan begitu pemerintah setempat melalui dinas mengambil solusi lain yaitu melakukan penarikan retribusi kebersihan yang diambil rutin setiap bulannya dari masyarakat dengan ketentuan para pegawai meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Namun, kendala yang dihadapi oleh dinas ini masih berkutat pada anggaran dana yang direlokasikan untuk pembiayaan kebersihan. Jumlah anggaran dana tersebut hanya mencukupi untuk pembayaran gaji pegawai dan perawatan sarana dan prasarana dinas tanpa ada penambahan sarana dan prasarana baru. Oleh karena itu dinas perlu mengupayakan usaha lain yaitu dengan memberlakukan retribusi kebersihan untuk menambahi dana kebersihan pemerintah Kabupaten Mojokerto. Retribusi ini nantinya diperuntukkan bagi

perusahaan-perusahaan yang ada, pasar tradisional dan warga masyarakat yang ingin mendapat pelayanan lebih seperti menitipkan sampahnya pada personil dinas di lapangan untuk diangkut menuju tempat pembuangan. Retribusi ini sangatlah diharapkan dinas agar dapat berjalan efektif karena dinas memang sangatlah membutuhkan anggaran tambahan dari retribusi kebersihan ini. Jika hal ini terjadi maka dinas bisa membiayai penambahan sarana dan prasana baru dalam melakukan pengelolaan sampah. Oleh karenanya ketersediaan dana yang cukup merupakan faktor yang menentukan tingkat kelancaran dan keberhasilan dari pelaksanaan suatu program dalam peningkatan kebersihan dan pengelolaan sampah.

2. Faktor Kelemahan Organisasi :

a. Terbatasnya anggaran operasional.

Faktor dana atau anggaran merupakan salah satu faktor yang tidak dapat terpisahkan dalam hal pelaksanaan pembangunan termasuk hal pengelolaan sampah. Namun tanpa adanya dukungan anggaran yang cukup, merupakan suatu hambatan untuk melaksanakan pengelolaan sampah ini. Oleh karena itu pemerintah menyiapkan dana operasional yang berasal dari APBD untuk menjalankan kegiatan yang telah ditetapkan tadi.

Dalam urusan masalah kebersihan memang membutuhkan anggaran yang cukup besar seiring dengan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang demi kelancaran dalam pelaksanaannya sehingga pemerintah mencoba untuk mencari alternatif lain yaitu dengan memberlakukan retribusi kebersihan untuk menambahi anggaran yang tersedia. Sama halnya dengan pemerintah Kabupaten Mojokerto, hal yang dilakukan untuk menutupi anggaran dana kebersihan yang kurang yaitu melalui penarikan retribusi kebersihan pada warga setiap bulannya. Hal ini bisa saja dilakukan oleh pemerintah melalui dinas asalkan diiringi dengan peningkatan pelayanan kebersihan pada masyarakat sehingga tidak ada kekecewaan pada masyarakat terhadap kinerja dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menciptakan kebersihan kota.

b. Terbatasnya sarana prasana operasional.

Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak dipungkiri bahwasannya faktor sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang penting pada dinas kebersihan dalam peningkatan pelayanan kebersihan pada masyarakat. Terbatasnya sarana dan prasarana merupakan suatu yang bisa menghambat kinerja dari para personil dinas.

Menurut penulis, tanpa terkecuali disini pada dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang untuk mencukupi sarana dan prasaran operasional yang ada. Hal ini dikarenakan apabila sarana dan prasarana tidak menunjang, maka kinerja dari para personil dinas tidak akan dapat maksimal. Kekurangan dari sarana dan prasarana operasional ini tidak lain dikarenakan anggaran dari APBD yang diberikan tidak mencukupi. Oleh karena itu untuk memberikan sarana dan prasarana yang menunjang, pemerintah melalui dinas harus benar-benar mengefektifkan pungutan yang berasal dari retribusi kebersihan agar anggaran dalam pengelolaan sampah ini dapat mencukupi.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

1. Faktor Peluang Organisasi :

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Peningkatan kebersihan memang merupakan tugas dari Dinas Kebersihan. Mulai dari pemungutan hingga pengelolaan sampah menjadi tujuan utama dalam menangani masalah persampahan. Namun, semua tugas dari dinas tersebut tidak akan dapat terlaksana dengan baik apabila tidak ada turut serta atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yaitu disini dalam hal menangani masalah

sampah karena seperti yang kita ketahui bahwasannya penghasil sampah terbesar adalah masyarakat dan perusahaan yang ada.

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai aktor utama dalam peningkatan kebersihan disini perlu untuk melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk menekankan betapa pentingnya menjaga kebersihan. Peran serta masyarakat sangat penting karena apabila masyarakat telah sadar untuk tidak membuang sampahnya sembarangan, maka pekerjaan dari dinas itu sendiri akan berjalan dengan lancar. Dinas akan lebih mudah untuk mengkoordinir permasalahan sampah di kotanya.

b. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan keindahan.

Untuk meakukan suatu hal ke arah yang lebih baik, maka perlu adanya kesadaran dari seseorang yang hendak melakukan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasibuan (2003: 193), bahwa kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak.

Menurut penulis disini, peningkatan kesadaran masyarakat sangatlah penting karena menjaga kebersihan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas kebersihan yaitu dalam hal ini adalah Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto untuk mengurus masalah kebersihan kota, namun seluruh warga masyarakatnya juga harus ikut berpartisipasi di dalamnya. Apabila lingkungan bersih, maka keindahan dan kenyamanan hidup akan terasa, namun sebaliknya apabila peran serta dari masyarakat kurang dalam menjaga kebersihan, maka dampak buruk yang ditimbulkanpun akan terasa seperti apabila di musim hujan akan bisa mengakibatkan banjir dan membawa wabah penyakit pada masyarakat. Hal inilah yang perlu diperhatikan masyarakat agar mau ikut berperan serta dalam menjaga kebersihan kotanya dimulai dari yang paling dasar yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungannya. Hal tersebut sudah sangatlah membantu kerja dari dinas yang bersangkutan dalam melakukan pengelolaan sampahnya.

2. Faktor Tantangan Organisasi :

a. Luasnya wilayah pelayanan.

Luas wilayah pada suatu daerah menjadi suatu tantangan tersendiri oleh suatu dinas pemerintahan daerah untuk memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Dinas pemerintahan daerah setempat harus bisa untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimilikinya untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Seperti yang kita ketahui apabila dinas yang bersangkutan kurang bisa mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki, maka banyak pekerjaan dinas yang tidak dapat terselesaikan.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah di propinsi Jawa Timur yang memiliki wilayah bisa dibilang cukup luas. Oleh karena itu dinas-dinas yang ada pada Pemerintahan Kabupaten Mojokerto harus bisa mengoptimalkan pelayanannya, yaitu salah satunya disini adalah Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang yang menaungi masalah kebersihan kota. Dinas ini berusaha untuk tetap menjaga kebersihan kota dengan memanfaatkan kemampuan personilnya. Apabila kinerja dari para personil dinas tersebut dapat dimaksimalkan, maka luas wilayah bukanlah menjadi suatu hambatan untuk tetap memberikan pelayanan di bidang kebersihan.

b. Kurangnya kualitas SDM pelaksana di lapangan.

Kurangnya kualitas SDM pelaksana di lapangan merupakan salah satu tantangan lain yang harus dihadapi karena faktor kemampuan yang dimiliki para personil merupakan indikator penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Apabila personil atau SDM yang ada memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, maka semua tugas yang telah dibebankan padanya akan dapat terkoordinir dengan baik dan tepat sesuai dengan sasaran yang diharapkan tadinya.

Pada dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto, masih banyak personil pegawainya yang masih kurang kualitas SDMnya karena seperti kita ketahui bahwasannya banyak personil pelaksana di lapangan yang memiliki pendidikan di bawah rata-rata. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari dinas

setempat, karena faktor kemampuan juga menentukan kinerja yang dilakukan oleh personilnya. Apabila memungkinkan, tidak ada salahnya untuk melakukan diklat kepada para personil dinas yang melaksanakan tugas dilapangan untuk menambah kemampuannya dalam bekerja demi mencapai tujuan dari dinas yang telah ditetapkan



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan sampah secara terpadu di wilayah perkotaan bahwasannya merupakan penerapan manajemen persampahan yang baik dimulai dari proses perencanaan, kelembagaan/pengorganisasian, penganggaran biaya, dan pelaksanaan yang disertai dengan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dalam pengelolaan ini dinas berkoordinasi yang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kota yaitu Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto berkordinasi dengan pihak swasta dan masyarakat untuk dapat saling bekerjasama. Hal ini dikarenakan untuk tanggung jawab dalam pemeliharaan kebersihan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja namun harus dari seluruh pihak yang ada sehingga dinas lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan oleh penulis tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto sudah dapat menjalankan program-program dinas terkait dengan pengelolaan sampah secara terpadu yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengerakan, dan pengawasan dengan baik
2. Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kota dimana untuk mengelola sampahnya ditangani Unit di bawah Dinas PU yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang memadai untuk mengolah sampah. Secara umum pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Kabupaten Mojokerto sudah cukup baik. Selain berfungsi sebagai pengelola sampah, dinas tersebut juga berperan sebagai pengatur, pengawas, dan pembina pengelola persampahan
3. Ketersediaan dana pemerintah untuk menangani persampahan di Kabupaten Mojokerto masih sangat kecil, demikian juga retribusi yang diperoleh dari

konsumen malah dirasa masih memberatkan masyarakat. Rata-rata jumlah perolehan retribusi tersebut masih tidak sebanding dengan proses pengelolaan pelayanan sampah yang dilakukan oleh Dinas. Untuk menarik retribusi tersebut sering digunakan jasa petugas - petugas dari penyedia jasa lainnya, seperti PLN, PDAM. Untuk itu pemerintah Kabupaten Mojokerto menarik peraturan tentang retribusi sampahnya.

4. Secara teknis data (informasi) produktivitas dan komposisi sampah, sangat berpengaruh terhadap sistem pengelolaan yang direncanakan. Hal tersebut mengingat rancang tindak penanganan yang hendak dilakukan haruslah mampu mengakomodasi perubahan-perubahan dari karakter sampah yang ditimbulkan, keterkaitannya dengan sistem pengangkutan, efektifitas waktu timbun sampah, peralatan penunjang dan sarana-prasarana di tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA).
5. Kemampuan para personil pelaksana di lapangan masih perlu untuk ditingkatkan lagi mengingat kebutuhan akan pengelolaan sampah yang baik guna meningkatkan kebersihan kota dengan melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) secara rutin.
6. Sarana dan prasarana yang ada masih terkesan minim dan banyak yang telah usang sehingga perlu adanya peremajaan yang dilakukan oleh dinas sehingga sarana dan prasarana yang ada dapat memadai untuk dinas dalam melakukan pengelolaan sampah di kotanya.

B. Saran

Penulis memiliki beberapa saran atau rekomendasi yang kiranya dapat dijadikan acuan bagi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto dalam upaya pengelolaan sampah secara terpadu di perkotaan pada masa mendatang. Saran ini diberikan penulis setelah melihat hasil dan fakta di lapangan. Adapun saran atau rekomendasi yang penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip *good and cooperate governance*, yang berupa:
 - a. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan persampahan
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang transparan, partisipatif, serta akuntabel dalam pengelolaannya
 - c. Pelibatan semua stakeholder dalam pengelolaan persampahan
 - d. Pengelolaan persampahan secara efektif, efisien, dan profesional
 - e. Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan pengelola persampahan

2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan

Pelayanan sistem pengelolaan persampahan haruslah mampu menjangkau setiap anggota masyarakat yang ada di Kabupaten Mojokerto, baik masyarakat golongan mampu maupun mereka yang kurang mampu, baik mereka yang ada di perkotaan maupun di perdesaan. Jumlah anggota masyarakat yang terjangkau oleh pelayanan juga harus meningkat dari waktu ke waktu untuk dapat mencapai sasaran pelayanan yang diharapkan. Disamping itu pelayanan juga harus disediakan/ diberikan dengan kualitas yang baik sehingga mampu menjamin tidak ditimbulkannya berbagai masalah gangguan, pencemaran, atau bahkan perusakan lingkungan; baik pada tahap pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, maupun pembuangan akhir.

3. Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan

Data sampah di Kabupaten Mojokerto menunjukkan kecenderungan semakin besarnya timbunan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan beban pelayanan persampahan di Kabupaten Mojokerto menjadi semakin berat dari waktu ke waktu. Di pihak

lain kemampuan pendanaan daerah tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan khususnya untuk bidang persampahan. Agar pengelolaan persampahan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan maka sangat diperlukan adanya upaya untuk mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

4. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta

Masyarakat merupakan penghasil sampah, karenanya masyarakat merupakan aktor utama dalam pengelolaan sampah yang perlu diberdayakan agar mampu melakukan berbagai upaya penanganan yang bermanfaat bagi pengelolaan secara umum. Dalam kondisi keterbatasan kapasitas pelayanan Pemerintah, maka dunia usaha/swasta juga dapat dijadikan sebagai mitra untuk mewujudkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik.

